

KHADIMUL UMMAH

Journal of Social Dedication

KHADIMUL UMMAH

Journal of Social Dedication

Editors in Chief

Muhamad Fajar Pramono, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Editorial Board Members

Dihyatun Masqon, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Imam Bahroni, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Mulyono Jamal, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Jarman Aroisi, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Mohammad Ghozali, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Suminah, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Dian Arymami, Universitas Gajah Mada, Indonesia

Editorial Assistants

Nurhana Marantika, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Dian Afif Arifah, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Lutfy Ditya Cahyanti, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Sekretariat

Meylia Anggun Lisdiana

Alamat Redaksi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Universitas Darussalam Gontor

Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Telp (0352) 483762;

Fax. (0352) 488182

Web site: <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/khadimulummah>

Email: khadimulummah@unida.ac.id

Khadimul Ummah (*Journal of Social Dedication*) adalah jurnal yang memuat artikel ilmiah multidisiplin hasil pengabdian kepada masyarakat. Terbit dua kali dalam satu tahun (November dan April). Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan ide dan hasil penelitian yang telah diimplementasikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

Penerapan Metode Langsung dalam Pengajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Islam <i>Ifa Rodifah, Fitri Setyo Rini</i>	1
Penerapan Manajemen Krisis dalam Pengelolaan Bencana Longsor di Desa Banaran, Pulung, Ponorogo <i>Muhamad Fajar Pramono, Setiawan bin Lahuri, Mohammad Ghozali</i>	8
Penerapan Akuntansi untuk Pembuatan Laporan Keuangan bagi Unit-unit Usaha di Universitas Darussalam Gontor <i>Rahma Yudi Astuti, Mohammad Zaenal Abidin, Dhika Amalia Kurniawan</i>	15
Membangun Infrastruktur Jaringan RT/RW Net Guna Mendukung Aplikasi Sistem Informasi Desa (SIMADES) <i>Shoffin Nahwa Utama, Aziz Musthafa</i>	22
Penerapan Sistem Jaminan Halal dan Strategi Pemasaran Halal Pada UKM Bidang Olahan Hewani di Kabupaten Ponorogo <i>Tian Nur Ma'rifat, Maya Sari</i>	28
Pelatihan Budidaya Cacing Tanah Lumbricus di Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo <i>Use Etica, Lutfi Ditya Cahyanti</i>	35

Penerapan Metode Langsung Dalam Pengajaran Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Ponorogo

The Application of Direct Methods in Teaching Arabic Language in Islamic Boarding Schools Al-Islam Joresan Ponorogo

Ifa Rodifah Nur, Fitri Setyo Rini*

Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, Universitas Darussalam Gontor,
Jawa Timur, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fitrisetyo1@gmail.com

ABSTRAK

Bahasa Arab adalah bahasa Qur'an, kitab suci umat Islam. Karena itu, bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting bagi ratusan juta umat Islam di seluruh dunia, baik Arab ataupun non Arab. Pondok Pesantren Al-Islam Joresan adalah salah satu pondok pesantren yang mencoba menciptakan kader-kader Islam dan kader bangsa dengan membekali murid mereka dengan pembelajaran bahasa Arab. Namun, Pondok Pesantren Al-Islam Joresan memiliki masalah dalam belajar bahasa Arab, di antara masalah yang signifikan adalah minimnya kompetensi berbahasa Arab di kalangan siswa. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian antara metode pengajaran dengan tujuan yang ingin dicapai, menerapkan metode tarjamah dengan tujuan meningkatkan kemampuan berbahasa Arab. Dari permasalahan yang ada, kami menawarkan solusi dalam metode pengajaran dengan penerapan metode langsung yang keberhasilannya telah dibuktikan oleh banyak ahli bahasa, salah satu institusi yang telah menerapkan adalah Pondok Modern Darussalam (UNIDA) Gontor. Cara ini berhasil membuat siswa mampu berbicara bahasa target dengan baik. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan kuesioner. Program ini menggunakan metode eksperimen dengan analisis korelasi antara sebelum dan sesudah pengabdian masyarakat. Hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berbahasa Arab antara sebelum dan sesudah metode langsung.

Kata kunci: pembelajaran Bahasa Arab; PP Al Islam Joresan; metode langsung

ABSTRACT

Arabic is the language of Qur'an the holy book of the Muslims. Therefore, Arabic is the language with the greatest significance for hundreds of millions of Muslims around the world, whether Arab or not. Pondok Pesantren Al-Islam Joresan is one of Islamic boarding schools that try to create cadres of Islam and cadres of nation, then they equip their students with Arabic language learning. However, Pondok Pesantren Al-Islam Joresan has problems about learning Arabic language, among the significant problems is the lack of Arabic speaking competencies among students. This is due to the inadequacy between the teaching method and the goal to be achieved, applying the method of tarjamah with the aim of improving the ability to speak Arabic. From the existing problems we offer solutions in teaching method with the application of direct methods that have been proven by many language experts, one of institution which has been applied is Pondok Modern Darussalam Gontor. This method successfully makes the students able to speak the target language well. Data collection techniques used tests and

questionnaires. This program used experimental method with correlation analysis between before and after community empowerment. The results of data analysis show an increase in Arabic speaking ability between before and after direct method.

Keywords: Arabic language learning; PP Al Islam Joresan; direct method

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang penting dalam kehidupan manusia karena bahasa adalah salah satu media berbentuk ucapan lisan, simbol atau gambar-gambar dan huruf untuk menyampaikan suatu keinginan antara yang satu dengan yang lainnya.¹ Bahasa dipergunakan oleh manusia dalam segala aktifitas kehidupan. Dengan demikian, bahasa merupakan hal yang paling hakiki dalam kehidupan manusia. Sedangkan secara sosiolinguistik, bahasa dan masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan, keduanya memiliki hubungan mutualistik antara yang satu dengan yang lain saling ada ketergantungan, membutuhkan dan menguntungkan .

Bahasa Arab merupakan bahasa al-Qur'an kitab suci umat Islam yang merupakan petunjuk Allah untuk seluruh umat manusia. Maka dari itu sudah semestinya setiap muslim mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana dalam kaidah Fiqh, **ما لا ينْهَا الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبٌ** (Sesuatu yang dengannya kewajiban tidak dapat sempurna maka ia juga wajib). Maka dari itu, tentu saja bahasa Arab merupakan bahasa yang paling besar signifikasinya bagi ratusan juta muslim sedunia, baik yang berkebangsaan Arab maupun tidak.²

Bahasa arab sebagai bahasa asing di Indonesia menduduki posisi yang strategis terutama bagi umat Islam Indonesia. Selain karena bahasa Arab digunakan dalam ritual keagamaan seperti shalat, khutbah jum'at, dalam berdo'a dan lain-lain, tetapi juga menjadi bahasa ilmu pengetahuan (*lughat al'ilm wa al-ma'rifah*) dan bahasa pergaulan internasional. Sumber-sumber ajaran Islam yang sebagian besar masih ditulis dalam bahasa Arab menyebabkan bahasa ini *identic* dengan bahasa Islam dan umat Islam itu sendiri (*lughat al-islam wa al-muslimin*). Siapa saja yang ingin memahami Islam dari sumbernya yang asli, maka ia harus menguasai bahasa Arab sebagai alat untuk memahaminya. Inilah salah satu faktor pendorong diajarkannya bahasa Arab di sekolah-sekolah muslim di seluruh dunia.³

Keterampilan berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan dalam suatu percakapan.⁴ Ketrampilan berbicara bahasa arab sangat penting bagi umat muslim khususnya, karena berbicara merupakan salah satu aspek

¹ The language is a conventional system spoken or written symbols by means of which human being as member of social group and participant in its cultural communicate. Dr. Dihyatun Masqon, MA., *Nahwa Isthiratijiyah Ta'limu-L-Lughoh Al-Arabiyah Al-Fi'al Linatiqina Bi Ghoiriha, Qira'atu Fi Tajribati Ma'hadi Darussalam Gontor Al-Hadist*, tulisan tidak diterbitkan, tanpa tahun, hal. 218

² Azhar Arsyad, *Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 1

³ Abdul Munip, *Problematika Penerjemahan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia dalam al-'Arabiyyah* Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 1 No. 2 Januari 2005, hal. 1

⁴ Dyah Ayu Riskiyanti dan Abdul Hafidz Zaid, *Muhawalatu Ma'hadi Darissalam Gontor Lil banaat Ats Tsani fi takwini Al Bi'ah Al Lughowiyah Li Iktisabi Maharoti Al Kalam Al'arabi*, Ponorogo: Jurnal At-Ta'dib. (Vol. 12, NO. I, Juni 2017), hal. 90

ketrampilan berbahasa yang bersifat produktif, artinya suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan ide, gagasan, pengetahuan dan informasi agar bisa dipahami oleh orang lain. Pembelajaran bahasa mempunyai banyak sekali metode dengan tujuannya masing-masing. Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, semakin baik metode yang digunakan maka akan semakin mempengaruhi hasil dari tujuan. Sehingga, metode ini menjadi unsur yang sangat penting dalam keberhasilan pengajaran.⁵

Metode langsung (*direct method*) merupakan salah satu metode pembelajaran bahasa asing yang sangat memperhatikan dengan kecakapan berbicara anak didik,⁶ Metode langsung merupakan metode latihan dan pembiasaan berbahasa asing agar lebih familiar bagi para peserta didik, mengingat bahasa asing bukanlah bahasa sehari-hari mereka. Dalam prakteknya guru mengajar tanpa menggunakan bahasa ibu dengan bantuan alat peraga atau alat bantu ajar lainnya.

Salah satu pondok pesantren yang mengajarkan bahasa arab pada santrinya adalah Podok Pesantren Al-Islam yang terletak di desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Pondok pesantren Al-Islam dalam upayanya mencetak kader umat dan kader bangsa membekali santriwan/ti nya dengan pembelajaran bahasa arab. Namun daripada itu seperti halnya lembaga lain Ponpes Al-Islam tidak terlepas dari permasalahan seputar pengajaran dan pembelajaran bahasa arab. Salah satu kendala yang dihadapi Ponpes Al-Islam dalam pembelajaran dan pengajaran adalah penerapan ketrampilan berbicara bahasa Arab. Dalam hal ini keadaan kemampuan berbicara bahasa arab antar santriwan/ti masih sangat minim.

Oleh karena itu pihak UNIDA Gontor ingin melakukan kerjasama penelitian dengan menerapkan metode langsung guna meningkatkan kemampuan ketrampilan berbicara bahasa arab santriwan dan santriwati Al-Islam Joresan.

Metode pembelajaran adalah tingkat perencanaan program yang bersifat menyeluruh yang berhubungan erat dengan langkah-langkah penyampaian materi pelajaran secara procedural, tidak saling bertentangan, dan tidak bertentangan dengan pendekatan (*approach/madkhah*). Atau sederhananya, menurut Acep Hermawan metode adalah langkah-langkah umum tentang penerapan teori-teori yang ada pada pendekatan tertentu.⁷

Setiap orang yang bergelut dalam bidang pengajaran bahasa pasti menyadari pentingnya metodologi yang selayaknya dikuasai oleh calon pendidik atau pengajar sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Prof. Mahmud Yunus (1942):

الطريقة أهم من المادة

Kenyataan menunjukkan bahwa seseorang yang cukup pintar dan menguasai suatu ilmu tertentu acap kali menemui semacam batu sandungan dalam mengkomunikasikan ilmu tersebut secara efektif.⁸

⁵ Fathul Maujud, *Dirasatu an Takhtiti Tadrisi Al lughoh Al 'Arabiyyah fii Al Jaami'ah Al Islamiyyah*, Ponorogo: Jurnal At-Ta'dib, (Vol. 12, No. I, Juni 2017), hal. 123

⁶ Abdul Hafidz Zaid, *Teknologi At Ta'lim Al muqtarohah Lita 'limi maharato Al kalam Litullabi Al mustawa Al mutawassith fii Indonesia*, Jurnal: Lisanudhah, (Vol. 12, NO. I, Juni 2017), hal. 91

⁷ Acep Hermawan, *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet II, 2011), Hal. 167-199

⁸ Azhar Arsyad, *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet III, 2010), hal. 66

Dari sini tampak bahwa strategi belajar mengajar mengatur seluruh komponen, mencakup cara yang berlaku umum maupun dalam menyajikan setiap bidang studi. Oleh sebab itu, komponen strategi ini dalam pelaksanaan kurikulum tergambar dari cara melaksanakan bimbingan dan penyuluhan serta mengatur kegiatan lembaga secara keseluruhan.

Sebagaimana kelahiran metode lainnya, metode langsung (*Direct Methode/al-Thariqah al-Mubasyirah*) muncul karena ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa dengan metode sebelumnya, yakni metode terjemah, dan karena ada perubahan orientasi dan tujuan dari pengajaran bahasa asing yang dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan nyata di masyarakat. Pelopor gerakan ini adalah Francois Gouin (1880-1992), ia mengembangkan metodenya berdasarkan pengamatan-pengamatannya terhadap penggunaan bahasa ibu oleh anak-anak. Hasil pengamatannya itulah yang membuka jalan bagi usaha pengembangan metode baru. Dia memperbaiki pengajaran bahasa dengan menerapkan prinsip psikologi modern dan pelajaran bahasa; ia menerapkan prinsip-prinsip asosiasi ide-ide, penyajian gambar (visualisasi) dan pembelajaran melalui pancha indera, pemusatan kegiatan pada minat, permainan dan aktifitas di dalam situasi normal sehari-hari. Cara pengajaran inilah yang kemudian melahirkan pergerakan baru dalam pengajaran bahasa. Metode ini menginginkan pengajaran bahasa asing dengan langsung menggunakan bahasa tersebut tanpa menggunakan bahasa pengantar lainnya. Dengan ini, diharapkan terbentuk miliu bahasa arab yang merupakan unsur terpenting dalam belajar dan mengajarkan Bahasa Arab.⁹

METODE

1. Objek pengabdian

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Pondok pesantren Al-Islam yang terletak di Joresan Mlarak Ponorogo. Pondok ini merupakan salah satu pondok pesantren yang berusaha mencetak kader umat dan kader bangsa membekali santriwan/ti nya dengan pembelajaran bahasa arab. Namun daripada itu seperti halnya lembaga lain Ponpes AL-Islam tidak terlepas dari permasalahan seputar pengajaran dan pembelajaran bahasa arab. Salah satu kendala yang dihadapi Ponpes Al-Islam dalam pembelajaran dan pengajaran adalah penerapan ketrampilan berbicara bahasa arab. Dalam hal ini keadaan kemampuan berbicara bahasa arab antar santriwan/ti masih sangat minim. Oleh karena itu pihak Unida Gontor ingin melakukan kerjasama penelitian dengan menerapkan metode langsung guna meningkatkan kemampuan ketrampilan berbicara bahasa arab santriwan dan santriwati. Adapun sampel yang diambil adalah santriwati kelas 1A dan 1B yang berjumlah 42 santriwati, yang bertempat tinggal di asrama pondok pesantren.

2. Sarana prasarana

Dalam proses pengajaran kami membutuhkan sarana prasarana untuk menunjang optimalisasi pengajaran bahasa arab dengan metode langsung, diantaranya ruang kelas beserta perlengkapannya serta alat peraga yang kami butuhkan untuk membantu siswa dalam memahami kosakata baru yang

⁹ Dyah Ayu Riskiyanti dan Abdul Hafidz Zaid, *Muhawalatu Ma’had Darissalam Gontor Lil banaat Ats Tsani fi takwini Al Bi’ah Al Lughowyah Li Iktisabi Maheroti Al Kalam Al’arabi*, Ponorogo: Jurnal At-Ta’dib. (Vol. 12, NO. I, Juni 2017), hal. 91

kami sampaikan. Selain pengadaan beberapa alat peraga seperti jangka, kemoceng, penggaris segitiga, dan lain sebagainya kami pun memanfaatkan keadaan di sekitar kami sebagai alat bantu ajar, seperti tembok, jendela, pintu, dan lain sebagainya.

3. Langkah-langkah pelaksanaan program

a. Survey

Iptek bagi masyarakat (IbM) Penerapan Metode Langsung Dalam Pengajaran Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Al-Islam ini telah dilaksanakan dari tanggal 4 Maret 2017 hingga 14 Juli 2017. Hal pertama kali yang telah kami lakukan yaitu survey lokasi yaitu PP. Al-Islam yang terletak di desa Joresan kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini kami langsung menghubungi penanggung jawab PP Al Islam dan mewawancara beliau terkait hal-hal yang kami butuhkan dalam proses pengabdian masyarakat di pondok tersebut.

b. Pre-test



Setelah mengadakan survey dan terjadi kesepakatan kerja sama dengan pihak PP Al Islam, kami memulai langkah kami dengan mengadakan *pre test* pada tanggal 4 Maret 2017, pukul 20.00-21.30 WIB. *Pre test* kami lakukan secara lisan, dikarenakan kemampuan yang ingin kami tahu dari santriwati adalah kemampuan berbahasa arab secara aktif. Setelah itu, kami lakukan pengajaran pengajaran dengan metode langsung bersama seluruh santriwati kelas 1A dan 1B sejumlah 42 anak. Selain itu juga

kami bagikan kuesioner kepada santriwati sebagai pendataan.

c. Pengajaran Pengajaran dengan Metode Langsung

Sebelum dimulai pengajaran, tim pengabdian melakukan pengajaran singkat tentang pengajaran yang akan diselenggarakan dengan metode langsung. Pengajaran itu berlangsung pada tanggal 4 Maret 2017, 21.30-22.00 WIB dengan dihadiri oleh seluruh santriwati PP Al Islam kelas 1A dan 1 B yang berjumlah 42 anak. Pengajaran itu ditujukan agar santriwati memahami secara umum pengajaran dengan metode langsung, sehingga proses pengajaran bisa lebih optimal.

d. Pengajaran Bahasa Arab dengan Metode Langsung

Penyusunan bahan ajar kami



lakukan setelah mengetahui kemampuan santriwati berdasarkan hasil *pre test* mereka. Identifikasi permasalahan mitra yaitu kesulitan penerapan ketrampilan berbicara bahasa arab. Dengan demikian, pengajaran bahasa arab dengan metode langsung dan materi yang telah kita sesuaikan dengan kemampuan mereka kita selenggarakan selama 8 kali pertemuan dengan 24 judul pembahasan. Proses pengajaran dilaksanakan oleh 3 orang pengajar di dalam 3 ruang kelas dengan santriwati yang berjumlah 14 orang di tiap kelas. Pengajaran dimulai dengan salam dan bacaan basmalah dan dilanjutkan dengan kalimat sapaan bahasa Arab. Kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan materi menuju ke pokok pembahasan. Guru memulai pembahasan materi dengan menyebutkan tiap kata dan kalimat dengan bahasa target (bahasa arab), dan santriwati menirukan apa yang disampaikan oleh guru dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dengan bahasa target. Dalam mengenalkan kata baru, guru langsung menggunakan alat peraga yang tepat dan menyebutkannya dalam bahasa arab yang ditirukan oleh santriwati. Tarjamah merupakan hal yang diharamkan dalam proses pengajaran menggunakan metode langsung. Beberapa kali guru menanyakan pertanyaan kepada santriwati di sela-sela penyampaian materi guna memastikan kefahaman mereka dengan materi yang telah disampaikan. Pelajaran ditutup dengan evaluasi materi yang telah disampaikan. Demikian proses pengajaran bahasa arab yang kami laksanakan selama mengajar di Pondok Pesantren Al Islam. Guru mengajar dengan penuh semangat dan santriwati menerima pelajaran pun dengan penuh semangat.

e. Post-test

Post test kami selenggarakan setelah proses pembelajaran dengan metode langsung kami tunjaskan, pada tanggal 14 Juli 2017, 09.30 – 10.30 WIB. Hal ini kami lakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pengajaran bahasa Arab buku Durusu Al Lughah Al arabiyyah 1 dengan Metode Langsung.

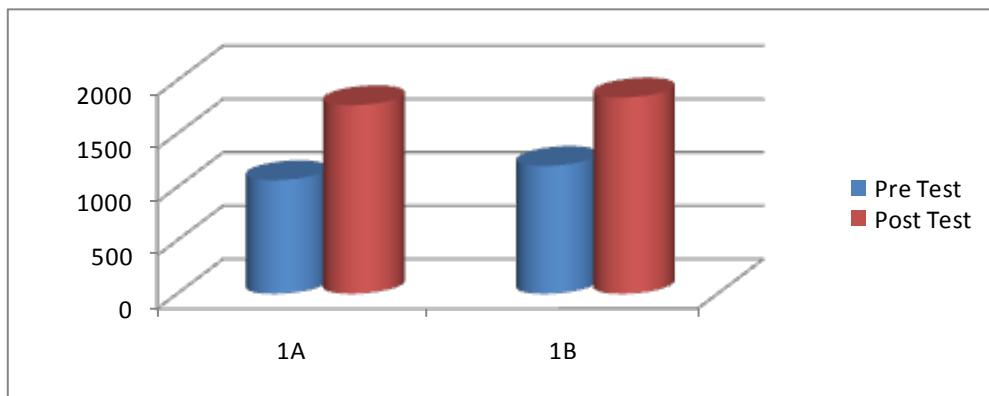
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari perhitungan yang kami lakukan dengan metode eksperimen menggunakan analisis korelasi menunjukkan **peningkatan hasil uji post-test** dibanding dengan hasil uji pre-test santriwati PP Al Islam, dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1: Tabel Peningkatan Hasil *Post test*

NO	KELAS	PRE-TEST	POST-TEST	PERBANDINGAN
1	1A	1064	1767	703
2	1B	1198	1840	642
	JUMLAH	2262	3607	1345

Dengan demikian, terjadi peningkatan yang signifikan dalam kemampuan mereka. Yang mana, hasil tersebut tergambar dalam diagram berikut:



Grafik 1: Grafik Peningkatan Hasil Post test

Begitu pula dengan hasil kuesioner yang kami sebarkan, menyatakan bahwa mereka senang dengan metode yang digunakan serta metode langsung ini dapat memudahkan mereka memahami materi serta menjadikan mereka berbahasa arab aktif selama proses pembelajaran.

Dengan demikian, metode langsung memiliki beberapa keunggulan dalam pembelajaran bahasa arab, diantaranya: *Pertama*, siswa termotivasi untuk dapat menyebutkan dan mengerti kata-kata kalimat dalam bahasa asing yang diajarkan oleh gurunya, apalagi guru menggunakan alat peraga dan macam-macam media yang menyenangkan. *Kedua*, karena metode ini biasanya guru mula-mula mengajarkan kata-kata dan kalimat sederhana yang dapat dimengerti dan diketahui oleh siswa dalam bahasa sehari-hari misalnya (pena, pensil, bangku, meja dan lain-lain), maka siswa dapat dengan mudah menangkap simbol-simbol bahasa asing yang diajarkan oleh gurunya. *Ketiga*, metode ini relatif banyak menggunakan berbagai macam alat peraga, maka metode ini menarik minat siswa, karena sudah merasa senang/tertarik, maka pelajaran terasa tidak sulit. *Keempat*, siswa memperoleh pengalaman langsung dan praktis, sekalipun mula-mula kalimat yang diucapkan itu belum dimengerti dan dipahami sepenuhnya. *Kelima*, alat ucap (lidah) siswa/anak didik menjadi terlatih dan jika menerima ucapan-ucapan yang semula sering terdengar dan terucapkan.

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan IbM Penerapan Metode Langsung dalam Pengajaran Bahasa Arab di PP Al Islam Joresan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari kuesioner yang kami lakukan terhadap koresponden menunjukkan bahwa metode yang kami tawarkan **baik**; sesuai dengan kebutuhan santriwati dan dapat meningkatkan kesemangatan mereka dalam belajar bahasa arab serta meningkatkan kecintaan mereka terhadap bahasa Arab.
2. **Peningkatan hasil uji post-test** dibanding dengan hasil uji pre-test santriwati PP Al Islam menunjukkan kemajuan kemampuan berbicara bahasa arab santriwati.
3. Masalah ketidaksesuaian metode pengajaran bahasa arab di PP Al Islam telah terpecahkan dengan diselenggarakannya pengajaran bahsa arab menggunakan **metode langsung**.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada LPPM dan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor yang telah mendukung dan memfasilitasi program ini. Kepada Al Ustadz Dr. H. Imam Bahroni, MA, ML.Sc, Al Ustadz Alif Cahya Setiyadi, Al Ustadz Fajar Pramono yang telah membimbing kami, anak-anak kami Wahid Budi Setiawan, Maghfiroh, Hairul Amri, Ricki Wirakanda, Ahmad Ario, Muhammad Noor dan Riza Romand.

Kepada Keuarga Besar Pondok Pesantren Al Islam Joresan Ponorogo yang telah berkenan menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

- Arsyad, Azhar. 2010. *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya*. Cet III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aslinda dan Leni Syafyahya. 2010. *Pengantar Sosiolinguistik*. Cetakan Ke-2. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fuad Effendi, Ahmad. 2003. *Metodologi pengajaran Bahasa Arab*. Malang: Penerbit Misykat.
- Hermawan, Acep. 2011. *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*. Cet II. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Khoirudin, Azaki. *Sains Islam Berbasis Nalar Ayat-ayat semesta*. Ponorogo: Jurnal At-Ta'dib. (Vol. 12, NO. I, Juni 2017)
- Maujud, Fathul. *Dirasatu an Takhtiti Tadrisi Al lughoh Al 'Arabiyyah fii Al Jaami'ah Al Islamiyyah*. Ponorogo: Jurnal At-Ta'dib. (Vol. 12, No. I, Juni 2017).
- Munip, Abdul. *Problematika Penerjemahan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia dalam al-'Arabiyyah*. Jurnal Pendidikan Bahasa Arab. (Vol. 1 No. 2 Januari 2005).
- Riskiyanti, Dyah Ayu dan Abdul Hafidz Zaid. 2017. *Muhawalatu Ma'hadi Darissalam Gontor Lil banaat Ats Tsani fii takwini Al Bi'ah Al Lughowiyah Li Iktisabi Maharoti Al Kalam Al'arabi*. Ponorogo: Jurnal At-Ta'dib. (Vol. 12, NO. I, Juni 2017).
- Rosikh, Fakhrur. 2014. *Ta'limu Al Mufrodat Li annaatiqin bihgairi Al lughoh Al 'arabiyyah, Nadhariyyan wa Tathbiqan*, Ponorogo. Jurnal Lisanudhad. (Vol. 01, No. 02, Desember 2014).
- Zaid, Abdul Hafidz. *Teknologi At Ta'lim Al muqtarohah Lita'lumi maharato Al kalam Litullabi Al mustawa Al mutawassith fii Indonesia*. Jurnal: Lisanudhah. (Vol. 12, NO. I, Juni 2017).

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i1.1418>

Penerapan Manajemen Krisis Dalam Pengelolaan Bencana Longsor Banaran, Pulung, Ponorogo

Implementation of Crisis Management In Management of Longsor Disaster Banaran, Pulung, Ponorogo

Muhamad Fajar Pramono^{1*}, Setiawan Lahuri², Mohammad Ghozali³

¹*Program Studi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuludin, Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur, Indonesia*

^{2,3}*Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur, Indonesia*

*Penulis Korespondensi: mfpramono@unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi pendampingan kepada Pemerintahan Desa Banaran Kecamatan Pulung dalam menerapkan manajemen krisis dalam penanganan bencana tanah longsor di Banaran. metode pelaksanaan pendampingan yang dilakukan, antara lain, yaitu: 1) ekspos ke media sosial. 2) Rekrutmen relawan 3) Penyusunan action-plans pendampingan. 4) pemetaan relawan dan proses penanganan bencana tanah longsor di Banaran 5) Melakukan studi banding. 6) Melakukan Focus Group Discutios (FGD). 7) Melakukan pelatihan/ workshop Pemetaan Rawan Bencana. 8) melakukan audensi dengan stakeholder untuk menjadi mutu dan kelangsungan program tersebut. Berdasarkan uraian di atas ditarik kesimpulan, Pertama, bahwa capaian program dengan rancangan program di awal ada yang sesuai, seperti, perubahan dalam pencegahan. Sedangkan yang melampaui capaian adalah dalam tahap tanggap bencana dan rehabilitasi. Adapun yang kurang sesuai dengan capaian adalah dalam tahap rekonstruksi. Kedua, perubahan yang dialami oleh mitra dalam hal ini pemeritahan Desa Banaran dan masyarakatnya adalah arti pentingnya pencegahan, yang selama ini dianggap remeh, ternyata berakibat fatal.

Kata kunci: manajemen krisis; pengelolaan bencana longsor; banaran pulung ponorogo

ABSTRACT

The purpose of this activity is to provide assistance to the Village Government of Banaran Pulung District in applying crisis management in handling longsor land disaster in Banaran. methods of implementation of assistance performed, among others, namely: 1) exposure to social media. 2) Recruitment of volunteers 3) Preparation of action-plans mentoring. 4) Volunteer mapping and longsor land disaster handling process in Banaran 5) Conduct a comparative study. 6) Conduct Focus Group Discutios. 7) Conducting workshop on Disaster Prone Mapping. 8) conduct audits with stakeholders to become the quality and continuity of the program. Based on the above description conclusions are drawn, Firstly, that the achievements of the program with the design of the program in the beginning there are appropriate, such as, changes in prevention. While that goes beyond achievement is in the stage of disaster response and rehabilitation. The less suitable for achievement is in the reconstruction phase. Second, the changes experienced by partners in this case Desa Banaran government and the community is the importance of prevention, which has been considered trivial, was fatal.

Keywords: crisis management; landslide disaster management; banaran pulung ponorogo

PENDAHULUAN

Fearn-Banks (1996:1) mendefinisikan krisis sebagai “*a major occurrence with a potentially negative outcome affecting an organization, company or industry, as well as its publics, products, services or good name*”. Biasanya sebuah krisis mengganggu transaksi normal dan kadang mengancam kelangsungan hidup atau keberadaan organisasi. Krisis pada dasarnya adalah sebuah situasi yang tidak terduga, artinya organisasi umumnya tidak dapat menduga bahwa akan muncul krisis yang dapat mengancam keberadaanya. Sebagai ancaman ia harus ditangani secara cepat agar organisasi dapat berjalan normal kembali setelah itu. Untuk itu Holsti melihat krisis sebagai “*situations characterized by surprise, high threat to important values, and a short decision time*” (Dikutip dalam Guth, 1995 : 125). Krisis membawa keterkejutan dan sekaligus mengancam nilai-nilai penting organisasi serta hanya ada waktu yang singkat untuk mengambil keputusan.

Shrivastava dan Mitroff (1987: 6) mendefinisikan krisis perusahaan sebagai “*events that threaten their most important goals of survival and profitability*”. Krisis menurut mereka diasosiasikan dengan kerusakan yang berskala luas terhadap kehidupan manusia, lingkungan alam dan institusi social dan politik. Krisis juga merupakan “*a disruption that physically affects a system as a whole and threaten its basic assumptions, its subjective sense of self, its existential core*”. Menurut mereka, krisis biasanya memiliki tiga dampak, yaitu pertama ancaman terhadap legitimasi organisasi, adanya perlawanan terhadap misi organisasi, dan ketiga, terganggunya cara orang melihat dan menilai organisasi. Adapun yang dimaksud organisasi dalam konteks ini adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan membicarakan aspek penanggulangan bencana dari perspektif ilmu sosial akan lebih mengarah pada pola ***behavioralisme seseorang dalam mempersiapkan suatu bencana***. Cara pandang ini setidaknya menjadi penting untuk melihat dampak bencana terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Penekanan terhadap aspek sosial terhadap skema penanggulangan bencana sendiri dikarenakan adanya perubahan paradigma ilmu bencana. Bencana kini bukan lagi dianggap sebagai fenomena yang sporadis, namun se bisa mungkin bencana tersebut dikelola dan direduksi. Oleh karena itulah, bencana bukan lagi dianggap sebagai hazard yang menempatkan bencana sebagai sesuatu yang absurd untuk dikelola. Akan tetapi, bagaimana kemudian kita menempatkan unsur keselamatan (safety) dalam bencana tersebut.

Munculnya gagasan “kerentanan” (*vulnerability*) adalah untuk mengakomodasi pranata maupun unit sosial sebagai bagian dari kajian bencana. Khususnya terhadap eksistensi peradaban dan kehidupan manusia yang berada di dunia. Bencana berikut faktor pemicu maupun implikasinya terhadap kehidupan manusia perlu untuk direduksi maupun terdeteksi sedini mungkin, sehingga dari situlah kemudian menciptakan ***skema manajemen bencana***. Adapun penggunaan istilah perspektif “*cultural theory*” yang digunakan dalam tulisan ini adalah suatu cara bagaimana dan mengapa individu memberikan penilaian terhadap bencana begitu juga potensi kerusakan yang ditimbulkannya. Hal ini terkait dengan upaya pemenuhan hak keadilan sosial kepada masyarakat untuk mengetahui informasi kebencanaan secara akurat dan mendetail.

Pemenuhan hak tersebut menjadi penting utamanya dalam mengkonstruksikan bencana tersebut karena isu penanggulangan bencana sendiri tidak terlepas dari ***tiga premis utama yakni kekuasaan (power), keadilan (justice), dan legitimasi kekuasaan (legitimacy)***. Relasi kekuasaan terhadap penanggulangan bencana adalah melihat bagaimana respons negara dalam menanggu-

langi dampak destruktif bencana baik dari segi sosial maupun ekologis dan konstruksi informasi publik yang dihadirkan negara terhadap bencana dan dampaknya kepada masyarakat. Isu keadilan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial bagi masyarakat dan legitimasi sendiri terkait dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menanggulangi bencana (Douglas, 2001 : 34). Ketiga hal tersebut dikristalkan dalam bentuk pemahaman *risk regulatory regime* yakni karakteristik rezim suatu negara dalam menanggulangi bencana.

Walaupun sebuah krisis dapat menjadi titik balik bagi semakin baiknya sebuah keadaan, tampaknya hampir tidak ada pimpinan organisasi yang mengharapkan situasi demikian untuk memperbaiki keadaan. Atau paling tidak organisasi tidak ingin mengalami suatu krisis. Karena mereka berharap demikian, mereka lupa bahwa krisis dapat saja terjadi pada perusahaan mereka, sehingga banyak pengelola perusahaan yang tidak menyadari pentingnya suatu perencanaan khusus untuk menghadapi dan menangani krisis yang mungkin muncul.

Wisenblit (1989 : 33) menyatakan :

“Too often succesfull companies are complacent. Management reads about other companies disaster with an it-can’t -happen-here attitude. They simply do not see the risk potential. Part of this because people are generally reluctant to think about crisis. But, thinking negatively – thinking of the worst possible disasters that could befall the company and planning for them – is the basis for crisis management planning”

Krisis tidak bergerak spontan, ia selalu diawali dengan gejala. Yang kadang tidak terlihat atau terdeteksi oleh perusahaan. Sehingga kurang tepat jika ada statement dari perusahaan atau organisasi yang mengatakan bahwa krisis di perusahaan mereka datangnya tiba-tiba. Karena krisis bergerak dari satu tahap ke tahap lainnya. Ketika tidak diantisipasi pada tahap awal, ia akan makin meluas dan merugikan organisasi dan publiknya. Tahapan krisis atau lazimnya disebut sebagai anatomi krisis memiliki arti yang berbeda-beda oleh sebagian ahli. Oleh Fink (1986) dan Sturges, dkk (1991) menyatakan ada empat fase yang dilewati oleh sebuah krisis. Sedangkan Fearn-Banks (1996) menyebutkan lima fase dari sebuah krisis. Namun secara garis besar kedua pendapat ini tidak menunjukkan perbedaan yang cukup berarti. Gonzales-Herrero dan Pratt (1995) menganalogikan krisis seperti tahapan kehidupan: kehamilan, kelahiran, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan (kematian).

Menarik yang terjadi dalam pengelolaan bencana di Banaran. Berdasarkan hasil survei Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNIDA Gontor (2017) dengan jumlah 37 KK atau sebanyak 134 anggota keluarga dimana jumlah korban 26 orang meninggal; 28 bangunan rumah hilang. Disisi lain respon organisasi non-pemerintah sangat besar, yaitu: 41 posko dengan terkumpulnya dana dalam bentuk tunei sebesar Rp 1,828,015,000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lapan juta lima belas ribu rupiah), diluar bantuan dalam bentuk beras, mie instan, obat-obatan dan logistik yang lain. Belum termasuk jumlah relawan sebanyak 1.682 personil, yang terdiri dari Polres Ponorogo 188 personil; Brimob 76 personil; Sabhara Polda 60 personil; K-9 18 personil; TNI 180 personil; BPBD 90 personil; Dinkes 90 personil; PMI 30 personil; Relawan 1000 personil; DVI Polda Jatim 10 personil; RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) sebanyak 50 anggota. Belum termasuk dari berbagai organisasi massa yang berbondong-bondong di lokasi.

Memang dalam konteks manajemen krisis apa yang terjadi di Banaran tidak sebagaimana pendapat Fearn-Banks (1996:1) sebuah krisis mengganggu transaksi normal dan kadang mengancam kelangsungan hidup atau keberadaan organisasi. Juga tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Shrivastava dan Mitroff (1987: 6) diasosiasikan dengan kerusakan yang berskala luas terhadap kehidupan manusia, lingkungan alam dan institusi social dan politik. Maksudnya dalam konteks Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, tetapi dalam konteks Pemerintahan Desa Banaran segala unsur krisis sebagaimana pendapat Fearn-Banks (1996) dan Shrivastava dan Mitroff (1987) terpenuhi, yaitu: disamping adanya krisis mengganggu transaksi normal dan kadang mengancam kelangsungan hidup atau keberadaan organisasi (desa Banaran), juga diasosiasikan dengan kerusakan yang berskala luas terhadap kehidupan manusia, lingkungan alam dan institusi social dan politik, dalam konteks Pemerintahan Desa.

Jadi yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintahan Desa (Pemdes) Banaran dari Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, dimana dalam hal ini yang sebagai leading sektor Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo, yaitu: support dalam bentuk landasan hukum, prosedur dan mekanisme serta panduan praktis baik dalam tahap pencegahan, tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi.

- 1). **Tahap pencegahan**, pada tahap ini berbagai upaya dilakukan untuk meminimalkan dampak buruk dari bencana alam. Beberapa kegiatan pada tahap ini adalah: penyadaran masyarakat pentingnya reboisasi dan pentingnya pemahaman bahaya penebangan hutan secara liar; juga soal pemahaman tekstur tanah, khususnya keterkaitan dengan jenis tanaman.
- 2). **Tahap tanggap darurat**, pada tahap tanggap darurat, hal paling pokok yang sebaiknya dilakukan adalah penyelamatan korban bencana alam. Inilah sasaran utama dari tahapan tanggap darurat. Selain itu, tahaptanggap darurat bertujuan membantu masyarakat yang terkena bencana alam langsung untuk segera dipenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal. Para korban juga perlu dibawa ke tempat sementara yang dianggap aman dan ditampung di tempat penampungan sementara yang layak. Pada tahap ini dilakukan pula pengaturan dan pembagian logistik atau bahan makanan yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana alam.

Secara operasional, pada tahap tanggap darurat ini meliputi kegiatan: -penanganan korban bencana alam termasuk mengubur korban meninggal dan menangani korban yang luka-luka. -penanganan pengungsian, -pemberian bantuan darurat, -pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih, -penyiapan penampungan sementara, -pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum sementara serta memperbaiki sarana dan prasarana dasar agar mampu memberikan pelayanan yang memadai untuk para korban;

- 3). **Tahap Rehabilitasi**, dalam tahap rehabilitasi, upaya yang dilakukan adalah perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan dan pengembalian harkat korban. Tahap ini bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi bangunan ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi adalah untuk memperbaiki pelayanan masyarakat atau publik sampai pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini juga diupayakan

penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek kejiwaan/psikologis melalui penanganan trauma korban bencana alam.

- 4). **Tahap Rekonstruksi**, upaya yang dilakukan pada tahap rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana, prasarana serta fasilitas umum yang rusak dengan tujuan agar kehidupan masyarakat kembali berjalan normal. Biasanya melibatkan semua masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Sasaran utama dari tahap ini adalah terbangunnya kembali masyarakat dan kawasan. Pendekatan pada tahap ini sedapat mungkin juga melibatkan masyarakat dalam setiap proses.

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah memberi pendampingan kepada Pemerintahan Desa Banaran Kecamatan Pulung dalam menerapkan manajemen krisis dalam penanganan bencana tanah Lonsor di Banaran.

Ini dilakukan karena dalam konteks *risk regulatory regime* ini **menempatkan negara sebagai aktor tunggal** dalam penanggulangan bencana. Konsepsi ini terkait dengan karakteristik penanggulangan bencana yang dilakukan oleh negara yang berbeda disesuaikan dengan keadaan ekologis, geologis, maupun morfologis negara tersebut (Kreps, 1985: 51). Paradigma risiko muncul sebagai wujud dari perkembangan lanjutan modernisasi kehidupan manusia di dunia. Istilah risiko sendiri diartikan sebagai sebuah kemungkinan serangan fisik yang diakibatkan dari perkembangan teknologi dan prosesnya. Artinya, risiko bencana sendiri terjadi dari sebuah proses perkembangan manusia di dunia dan bukan disebabkan oleh faktor alamiah bencana alam. Pemahaman risiko menarik dicermati untuk melihat keseimbangan relasi antar manusia dan alam selama ini yang menunjukkan gejala yang tidak seimbang.

Lebih lanjut, makna bencana sebagai kejadian (*events*) diartikan sebagai kejadian luar biasa (*extraordinary events*) yang memiliki pengaruh terhadap instabilitas manusia. Bencana sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga macam yakni fisik (*physical*), waktu (*temporal*), dan sosial (*social*). Artinya penanganan kasus bencana sendiri tidak bisa diseragamkan dalam satu pola saja. Misalnya saja dalam berbagai kasus penanganan di Indonesia sendiri, pola penanganan bencana berbasis kebutuhan *ad-hoc* selalu menjadi pilihan utama seperti pemberian bantuan makanan siap saji, perlengkapan tidur, maupun pakaian siap pakai. Dalam konteks ini, penanggulangan bencana perlu melihat pola dasar pemantik terjadinya sebuah bencana. Penanggulangan bencana juga perlu melihat waktu periode berlangsungnya bencana tersebut supaya upaya cepat melakukan evakuasi menjadi lebih efisien dan efektif.

Adapun yang dimaksudkan dengan mengelola risiko bencana dalam konteks ini adalah mengatur dampak bencana seminimal mungkin agar tidak menimbulkan dampak destruktif yang lebih besar lagi. Dalam pemahaman perspektif *cultural theory* yang menjadi tema utama dalam makalah ini, terdapat dua hal utama yakni pengetahuan tradisional dan pengetahuan modern. Dua hal tersebut sebenarnya sudah dibahas dalam sub bab sebelumnya dimana terdapat titik singgung antara tradisional yang berorientasi pada hal-hal bersifat sosial sedangkan pengetahuan modern berorientasi pada penanganan hal teknis. Pengetahuan modern lebih mengarah kepada pembentukan formulasi risiko/risk (R) merupakan bentuk dari gabungan eskalasi/exposure (E) dan besaran bencana/magnitude (M) sehingga membentuk format (R=EM) (Tansey, 1999 : 78).

Gagasan rezim pengelolaan bencana (risk regulatory states) sebenarnya merupakan bentuk institusionalisasi ide dari cultural theory tentang persepsi pengetahuan bencana oleh publik dengan menempatkan negara sebagai aktor tunggal dalam isu bencana tersebut. Penempatan negara sebagai rezim dalam isu penanggulangan risiko bencana ini tidak terlepas dari kegagalan pasar dan masyarakat dalam mengelola isu tersebut. Dalam teori governance memang terjadi desentralisasi kekuasaan antara negara, pasar, dan masyarakat yang memiliki fungsi penyeimbang dan pengontrol satu sama lain. Namun dalam teori cultural theory, governance menjadi tidak berhasil dalam mengurus penanggulangan risiko bencana dikarenakan limitasi sumber daya yang dimiliki pasar dan masyarakat.

METODE

Adapun metode yang digunakan memberi pendampingan kepada Pemerintahan Desa Banaran Kecamatan Pulung dalam menerapkan manajemen krisis dalam penanganan bencana tanah Lonsor di Banaran, antara lain, yaitu:

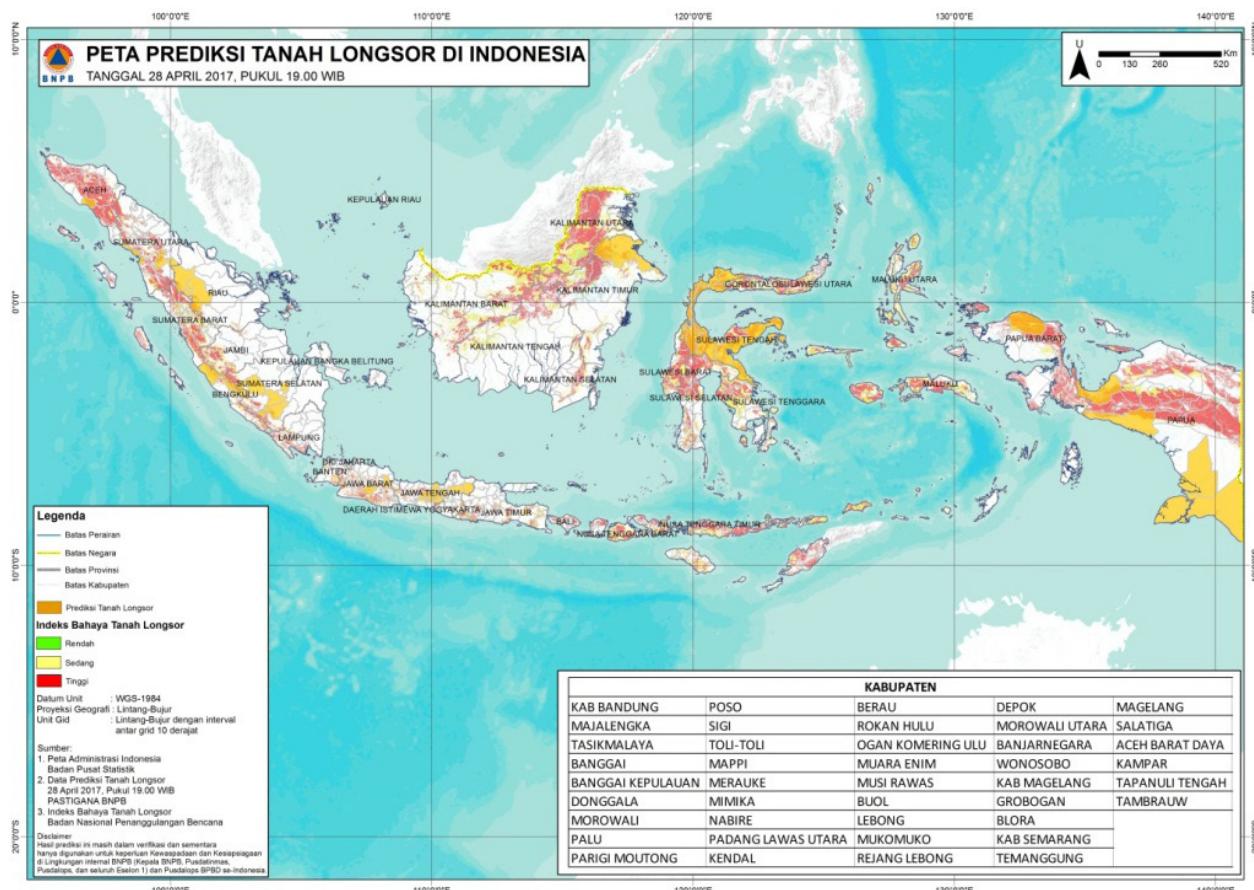
Tahapan awal, ada beberapa langkah yang dilakukan, antara lain, yaitu: 1) ekspos ke media sosial dalam rangka publikasi dan penggalangan dana. 2) Rekrutmen relawan dari kalangan akademisi, praktisi dan aktivis, termasuk membangun kerjasama dengan stakeholder, didalamnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBP) Kabupaten Ponorogo dan perguruan tinggi. 3) Penyusunan action-plans pendampingan.

Tahapan pelaksanaan, pada tahap ini dilakukan beberapa langkah, antara lain, yaitu: 1) pemetaan relawan dan proses penanganan bencana tanah Lonsor di Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, baik dalam tahap pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan tahap rekonstruksi. 2) Melakukan studi banding ke Bantul dalam rangka studi pengelolaan bencana, terutama pada tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi. 3) Melakukan Focus Group Discutios (FGD), terutama para relawan yang terlibat dalam tahap tanggap darurat dan tahap rehabilitasi. 4) Melakukan pelatihan/workshop Pemetaan Rawan Bencana bagi relawan dan petugas BPBD dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (c.q. BPBD Kabupaten Ponorogo).

Tahapan monitoring dan evaluasi, pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan audensi dengan BPBD Kabupaten Ponorogo, BPBD Kabupaten Bantul dan Perguruan Tinggi, terutama UNIDA Gontor dan Unmuh Ponorogo untuk menjadi mutu dan kelangsungan program tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Longsor merupakan salah satu ancaman bencana terbesar di Indonesia. Menurut data statistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), longsor menduduki peringkat ketiga yang memiliki frekuensi kejadian tertinggi setelah banjir dan puting beliung. Sudibyakto (2011) mengemukakan bahwa tingginya angka kejadian longsor di Indonesia disebabkan karena potensi curah hujan di beberapa daerah yang tinggi, kondisi geologis, batuan yang lapuk, kedalaman solum tanah yang cukup tebal, adanya bidang gelincir yaitu lapisan batuan yang tidak tembus air (*impermeable layers*) di dalam tanah, dan adanya kemiringan lereng lebih dari 30°. Khususnya di Pulau Jawa, tatanan geologi, karakteristik topografi dan karakteristik iklim menyebabkan tingginya paparan longsor (Christanto et al, 2009).



(Sumber: Sadewa, 2016)

Gambar 1. Peta Prediksi Longsor di Indonesia

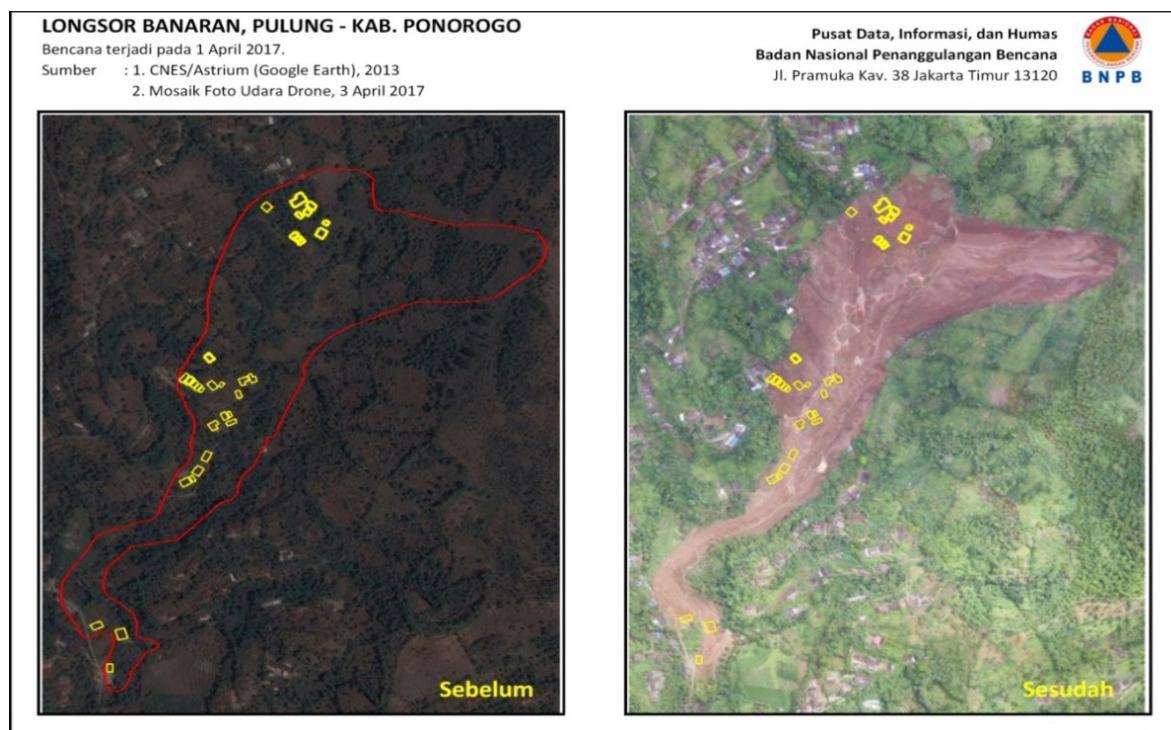
Menurut Sadewa (2016), faktor yang berkaitan dengan kejadian longsor di Pulau Jawa, antara lain :

- lokasi diatas zona subduksi, 60% wilayah Pulau Jawa merupakan pegunungan dengan rantai gunung volcano-tektonik dimana terdapat 36 gunung aktif dan material volkanik ini telah terlapukkan secara intensif.
- Pulau Jawa dipengaruhi iklim tropis yang lembab dan intensitas curah hujan yang tinggi.
- Aktivitas manusia yang merupakan dampak kepadatan demografis Pulau Jawa turut andil sehingga berakibat pada ketidakstabilan lereng.

Volume tanah longsor yang dihasilkan tersebut menjadikan tanah longsor Banaran kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, tercatat sebagai salah satu kejadian tanah longsor yang pertama kali terjadi Ponorogo. Tanah longsor tersebut disebabkan oleh runtuhnya dinding kaldera. Bencana ini mengakibatkan kerusakan pada berbagai infrastruktur dan dampak buruk pada lingkungan. Dampak lainnya adalah ancaman aktivitas sedimen cenderung meningkat dan mengarah kepada ancaman bencana terutama pada musim hujan. Pengaruh curah hujan dalam menghasilkan longsor adalah suatu yang jelas, meskipun sangat sulit untuk menjelaskan secara tepat (Blong and Dunkerley, 1976).

Kesulitan ini muncul karena curah hujan hanya mempengaruhi stabilitas lereng secara tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap kondisi air-pori di dalam material lereng. Kemudian Caine (1980) menggunakan istilah “pengaruh pemicu” curah hujan terhadap tanah longsor atau aliran debris. Karakterisasi curah hujan yang memicu tanah longsor atau aliran debris telah digunakan untuk membangun hubungan antara curah hujan dan tanah longsor/aliran debris di berbagai belahan dunia. Parameter curah hujan paling sering diselidiki dalam kaitannya dengan inisiasi longsor meliputi curah hujan kumulatif, curah hujan terdahulu, intensitas curah hujan, dan durasi curah hujan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menentukan batasan dengan menggunakan berbagai kombinasi parameter.

Sebagian besar lereng runtuh/tanah longsor dipicu oleh curah hujan ekstrim, sejumlah peneliti (misalnya, Campbell, 1975; Cotecchia, 1978; Caine, 1980; Cannon and Ellen, 1985; Neary and Swift, 1987; Kim et al., 1991; Wilson et al., 1992; Larsen and Simon, 1993; Wilson and Wieczorek, 1995; Terlien, 1998; Crosta, 1998; Crozier, 1999; Glade et al., 2000; Wieczorek et al., 2000; Aleotti, 2004; Guzzetti et al., 2004; Hong et al., 2005) telah mencoba untuk menetapkan ambang batas intensitas curah hujan dalam memprediksi lereng runtuh/tanah longsor secara akurat. Berbagai hasil penelitian menentukan batas curah hujan dalam hal intensitas curah hujan, durasi dengan rasio intensitas curah hujan, curah hujan kumulatif pada waktu tertentu, rasio curah hujan dengan curah hujan harian, curah hujan terdahulu dengan curah hujan rata-rata tahunan, dan curah hujan harian dengan maksimum rasio curah hujan terdahulu



(Sumber: BNPB, 2016)

Gambar 2. Luasan Dampak Longsor Banaran, Ponorogo

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) telah melakukan prediksi terhadap kejadian longsor di beberapa wilayah Indonesia, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 2. Gambar

tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo belum menjadi kajian BNPB. Padahal, wilayah Kabupaten Ponorogo juga rentan terhadap longsor. Pada tanggal 1 April 2017, telah terjadi bencana longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Seketika itu pula Ponorogo langsung menjadi ikon menarik untuk liputan media massa. Hal ini dikarenakan belum adanya catatan longsor yang berdampak sebesar ini sebelumnya. Luasan wilayah yang terdampak longsor Banaran dijelaskan dalam gambar 2.

Longsor di Desa Banaran dengan korban jiwa dari 26 orang dan 28 bangunan rumah hilang. Selengkapnya bisa dilihat tabel berikut:

Tabel 1: Daftar Korban dan Berdampak Tanah Longsor Desa Banaran

No	Nama Kepala Keluarga	Jmlah Anggota Keluarga	Meninggal	Selamat	Rumah		Keterangan
					Ada	Hilang	
1.	Suroso	3	1	2	v		
2.	Sujadi	3	1	2	v		
3.	Suryono	4	1	2	v		
4.	Muklas	4	1	3	v		
5.	Katemun	4	1	3		v	
6.	Sogol	3	-	3		v	
7.	Jais	4	-	4		v	
8.	Jeminem	2	-	2		v	
9.	Pujianto	6	3	3		v	
10.	Menit	4	1	3		v	
11.	Mintoko	3	-	3		v	
12.	Madikan	5	-	5		v	
13.	Mesiyah	3	-	3		v	
14.	Bintomo	1	-	1		v	
15.	Gianto	4	2	2		v	
16.	Wiyoto	4	3	1		v	
17.	Lit Kusnim	3	2	1		v	
18.	Sirmadi	3	-	3		v	
19.	Tamikun	3	-	3		v	
20.	Suyatno	4	-	4		v	
21.	Mesen	4	-	4	v		Tidak dihuni
22.	Yahmi	4	-	4		v	
23.	Sujarwo	4	-	4	v		Tidak dihuni
24.	Hananto	5	-	5		v	
25.	Poniran	3	2	1		v	

26.	Bonari	5	3	2		v	
27.	Sunadi	2	1	1		v	
28.	Katenu/denu	3	-	3		v	
29.	Kateni	3	1	2		v	
30.	Katemi	2	1	1		v	
31.	Meseri	1	-	1	v		Tidak dihuni
32.	Tolu	7	2	5	v		
33.	Kateno	2	1	1	v		
34.	Budi Suwito	4	-	4		v	
35.	Suwito	7	-	7		v	
36.	Sujari	3	-	3		v	
37.	Trimuryadi	4	-	4		v	
Jumlah		134	28	106	9	25	3

Sumber: Pemerintah Desa Banaran, 2017

Sekarang bagaimana dengan penerapan manajemen krisis yang dilakukan oleh Pemerintaha, dalam hal ini Pemerintahan Desa Banaran, Kecamatan Pulung dalam penanganan bencana longsor ? Berdasarkan hasil pendampingan bahwa yang dilakukan Pemeritahan Desa Banaran dalam tahap pencegahan tidak dilakukan secara baik. Dimana hampir seluruh tanah di bukit sekitar lokasi bencana saat ini menjadi ladang jahe. Seharusnya bukit tidak boleh diubah menjadi ladang atau sawah. Perubahan fungsi tanah tersebut membuat kondisi tanah tidak stabil. Jadi, kalau bukit dibuat ladang, tegalan apalagi sawah, maka potensi longsornya akan sangat besar (Herry Purnomo, Ketua Tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG, 2017).

Dalam konteks ini disamping karena faktor ketidak-pahaman, juga yang tidak kalah penting adalah faktor motiv ekonomi. Dimana jahe di Banaran mempunyai kualitas yang tinggi dan tentunya juga mempunyai nilai jual yang tinggi. Bahkan diantara mereka ada yang ekspor jahe ke luar negeri. Problemlnya tanah itu disatu sisi sangat baik untuk tumbuhnya jahe, tetapi sebaliknya bahwa tanaman jahe sangat berbahaya dengan tesktur tanah di Banaran. Kondisi ini tidak mudah bagi Pemerintahan Desa Banaran untuk bersikap.

Sedangkan dalam tanggap darurat yang menarik adalah kehadiran dan keterlibatan relawan. Berdasarkan hasil survei Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNIDA Gontor (2017) dengan jumlah 37 KK atau sebanyak 134 anggota keluarga dimana jumlah korban 26 orang meninggal; 28 bangunan rumah hilang. Disisi lain respon organisasi non-pemerintah sangat besar, yaitu: 41 posko dengan terkumpulnya dana dalam bentuk tunei sebesar Rp 1,828,015,000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lapan juta lima belas ribu rupiah), diluar bantuan dalam bentuk beras, mie instan, obat-obatan dan logistik yang lain. Belum termasuk jumlah relawan sebanyak 1.682 personil, yang terdiri dari Polres Ponorogo 188 personil; Brimob 76 personil; Sabhara Polda 60 personil; K-9 18 personil; TNI 180 personil; BPBD 90 personil; Dinkes 90 personil; PMI 30 personil; Relawan 1000 personil; DVI Polda Jatim 10 personil; RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia)

sebanyak 50 anggota. Belum termasuk dari berbagai organisasi massa yang berbondong-bondong di lokasi.

Fenomena itu cukup menarik, pertama, dengan besarnya kehadiran dan keterlibatan relawan sebagai bukti tingginya tingkat kepekaan dan kedulian masyarakat Indonesia dan khususnya Ponorogo, terlepas efek dari faktor media massa (mainstream maupun alternatif). Kedua, fenomena tersebut sebagai bukti bahwa dalam tanggap bencana ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dibanding pencegahan, rehabilitasi maupun rekonstruksi. Ketiga, disisi lain tentunya adanya masalah terkait efisiensi dan efektivitasnya, bahkan miss-manajemen dalam penanganan bencana. Bagaimana tidak dengan jumlah korban dengan dibandingkan jumlah relevan ? Ini mungkin yang perlu evaluasi. Padahal, misalnya terkait dengan logistik untuk menangani 37 keluarga. Tidak perlu 41 posko. Cukup 4-5 posko bisa terselesaikan. Terus bagaimana dengan logistik dari sekian posko ? Apakah benar-benar sampai ke sasaran ?

Sedangkan dalam tahap rehabilitasi, dimana tahap ini bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi bangunan ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi adalah untuk memperbaiki pelayanan masyarakat atau publik sampai pada tingkat yang memadai. Kerjasama antara unsur non-pemerintah dan pemerintah, termasuk Polri dan TNI cukup baik. Ada beberapa yang dilakukan, misalnya, memindahkan siswa sekolah dasar Banaran, Kabupaten Ponorogo di teras Masjid Jami di Dusun Krajan. Gedung SD Banaran memang berada di jalur rawan longsor susulan.

Juga yang dilakukan oleh LPPM Unida Gontor dengan menggandeng relawan dari mahasiswa UNMUH Ponorogo dengan melakukan pendampingan belajar siswa kelas 6 menghadapi ujian nasional; juga melakukan pendampingan wisata bagi korban bencana longsor Banaran. Juga Pondok Ramadhan dan bekerjasama dengan mahasiswa KKN Unida Gontor. Bentuk lain juga yang dilakukan oleh LAZISMU dengan mengadakan berbuka bersama dengan masyarakat korban Bencana. Namun semua, bukan inisiatif pemerintah, tetapi kreasi relawan.

Adapun dalam tahap rekonstruksi, sasaran utama dari tahap ini adalah terbangunnya kembali masyarakat dan kawasan. Pendekatan pada tahap ini sedapat mungkin juga melibatkan masyarakat dalam setiap proses. Hasil rapat bersama dengan Pemprov Jatim, Pemkab Ponorogo, dan semua



Gambar 3: Penulis di Lokasi
(Sumber: dok. Pribadi, 2017)

pihak terkait termasuk TNI, para korban longsor yang saat ini mengungsi berhak atas rumah. Ukurannya 6x8 meter. Diperkirakan, lokasi yang dijadikan tempat relokasi itu berada satu wilayah desa. Tempatnya saat ini tengah dicari yang paling laik. Ada 36 KK atau 108 orang yang saat ini menjadi korban longsor. Realisasi dari program tersebut adalah pembangunan rumah dengan anggaran APBD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dari partisipasi masyarakat berupa pembangunan dan renovasi tempat ibadah, baik masjid dan mushola-mushola; juga bantuan penerangan jalan.

Berdasarkan gambaran di atas untuk mengetahui sejauhmana perubahan dalam penerapan manajemen krisis yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Banaran. Memang tidak mudah. Karena secara umum baru menghadapi sekali ini, baik dalam pencegahan, tanggap bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi. Mungkin yang paling sognifikan adalah perubahan terkait dengan pencegahan. Dimana selama ini mereka hanya perpikir ekonomi an sich. Kini sudah memperhatikan mulai dan semakin memperhatikan lingkungan menjadi faktor penting dalam setiap pengambilan kebijakan.

Bagaimana efektivitas metode yang digunakan ? Ada beberapa metode pelaksanaan pendampingan yang dilakukan, antara lain, yaitu: 1) ekspos ke media sosial dalam rangka publikasi dan penggalangan dana. 2) Rekrutmen relawan dari kalangan akademisi, praktisi dan aktivis, termasuk membangun kerjasama dengan stakeholder, didalamnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo dan perguruan tinggi. 3) Penyusunan action-plans pendampingan. 4) pemetaan relawan dan proses penangan bencana tanah Lonsor di Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, baik dalam tahap pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan tahap rekonstruksi. 5) Melakukan studi banding ke Bantul dalam rangka studi pengelolaan bencana, terutama pada tahap rehabilitas dan tahap rekonstruksi. 6) Melakukan Focus Group Discutios (FGD), terutama para relawan yang terlibat dalam tahap tanggap darurat dan tahap rehabilitasi. 7) Melakukan pelatihan/ workshop Pemetaan Rawan Bencana bagi relawan dan petugas BPBD dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (c.q. BPBD Kabupaten Ponorogo). 8) melakukn audensi dengan BPBD Kabupaten Ponorogo, BPBD Kabupaten Bantul dan Perguruan Tinggi, terutama UNIDA Gontor dan Unmuh Ponorogo untuk menjadi mutu dan kelangsungan program tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas ditarik kesimpulan, Pertama, bahwa capaian program dengan rancangan program di awal ada yang sesuai, seperti, perubahan dalam pencegahan. Sedangkan yang melampaui capaian adalah dalam tahap tanggap bencana dan rehabilitasi. Adapun yang kurang sesuai dengan capaian adalah dalam tahap rekonstruksi.

Kedua, perubahan yang dialami oleh mitra dalam hal ini pemerintahan Desa Banaran dan masyarakatnya adalah arti pentingnya pencegahan, yang selama ini dianggap remeh, ternyata berakibat fatal.

Berdasarkan simpulan di atas ada yang perlu ditindak-lanjuti oleh pengabdia masyarakat yang lain, yaitu perlunya peningkatan intensitas komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder, terutama dalam tahap rekonstruksi. Juga dalam tahap tanggap bencana sudah sangat baik, tetapi perlu dibenahi dari segi manajemen krisisnya.

Sedangkan bagi pemerintaha perlu diformat BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

yang mengawinkan antara profesionalisme birokrasi dan kelincahan LSM atau organisasi non-pemerintah yang tanggap dan sigap.

Adapun bagi masyarakat, khususnya Desa Banaran Kecamatan Pulung untuk bercocok tanam tidak semata-mata mengejar pertimbangan bisnis, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, David. 2006. Globalization of Disaster. *Journal of International Affairs*, Vol.59, No.2. hal 1-23.
- Beck, Ulrich. 1992. *Risk Society : Toward New Modernity*. London : Sage Publication.
- Blaikie, P. 1994. *Disaster Pressure and Release Model in At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*. Routledge London
- Christanto, W.N., Hadmoko, D.S., Westen, C.J., Lavigne, F., Sartohadi, J., dan Setiawan (2009), *Characteristic and Behavior of Rainfall Induced Landslides in Java Island, Indonesia: an Overview Geophysical Researcr Abstract*. Vol. 11.EGU General Assembly.
- Douglas, Mary. 2001. *Risk and Blame*. New York : Taylor & Francis.
- H.A. Sudibyakto (2011), “*Perubahan Paradigma dalam Manajemen Bencana*”, yang disampaikan dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar di Ruang Senat UGM, Yogyakarta, Selasa, 22 Februari 2011
- H.A. Sudibyakto (2011), *Manajemen bencana di Indonesia ke Mana ?* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Cet. 1
- Hood, Christopher.2001. *The Government of Risk*. New York : Oxford University Press.
- Kreps, G.A. 1984. *Sociological Inquiry and Disaster Research. Annual Review of Sociology*, Vol. 10. No.1, hal. 309-330.
- Kreps, G.A. 1984. *Sociological Inquiry and Disaster Research. Annual Review of Sociology*, Vol. 10. No.1, hal. 309-330.
- Marsefio S. Luhukay, “*Penerapan Manajemen Krisis Di Indonesia : Memotret Krisis Dalam Kacama-ta Public Relations*”, dalam Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 2, No. 1, Januari 2008: 18 – 28.
- Sadewa, Resi (2016), *Kesiap-siagaan Masyarakat Terhadap Kerawanan Tanah Longsor di DAS Bomp-ton Kabupaten Magelang*, Tesis, Sekolah Pascasarjana, UGM, Yogyakarta.
- Smith, Anthony-Oliver. 1996. *Anthropological Research on Hazards and Disasters*. Annual Review of Anthropology, Vol. 25. No.2. hal. 303-328.
- Tansey, James. 1999. *Cultural Theory And Risk: A Review*. Health, Risk & Society, Vol.1, No.1, hal 71-90.

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i1.1419>

Penerapan Akuntansi Pembuatan Laporan Keuangan Kantin dan Photo Copy Di UNIDA Gontor

The Application of Accounting For The Preparation of Financial Statements of Canteen and Photo Copy in UNIDA Gontor

Rahma Yudi Astuti*, Mohammad Zaenal Abidin, Dhika Amalia Kurniawan

Prodi Manajemen Bisnis, Fakultas Syari'ah, Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rahmayudi67@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam unit-unit usaha Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor (kantin dan photo copy) belum menerapkan pencatatan akuntansi secara baik dan benar. Belum ditemukannya adanya laporan keuangan berupa laporan Laba/Rugi, Laporan perubahan Modal dan Neraca pada kedua Mitra tersebut. Permasalahan selanjutnya adalah belum ditemukannya masa kadaluarsa di makanan kering yang ada di kantin Unida Gontor. Program Iptek bagi Masyarakat (IbM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap unit-unit usaha, dalam hal ini adalah unit usaha kantin dan photo copy UNIDA Gontor. Pengetahuan yang dimaksud adalah dari segi penerapan pencatatan akuntansi, dan pembuatan laporan keuangan. Metode pelaksanaan yang ditawarkan ialah pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan laporan keuangan. Pelatihan dan pendampingan untuk mitra ini dilaksanakan dengan tahap: 1). pelatihan penerapan pencatatan akuntansi secara baik dan benar serta pembuatan laporan keuangan; 2). pendampingan dan pengevaluasian pelaksanaan pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan. Dengan kegiatan Program Ipteks bagi Masyarakat ini, diperoleh hasil yang cukup baik yaitu dihasilkannya laporan keuangan berupa laporan laba/rugi, laporan perubahan modal dan neraca di unit usaha kantin dan di unit usaha photo copy di tambah dengan unit usaha minimarket, unit usaha laundry, unit usaha persewaan sepeda motor, dan unit usaha armila. Ipteks ini direncanakan dua mitra tetapi berkembang menjadi enam mitra. Keenam mitra unit-unit usaha UNIDA Gontor tersebut sudah mempunyai laporan keuangan masing-masing dimana dari laporan keuangan tersebut bisa diketahui perolehan laba atau rugi masing-masing unit usaha, perubahan modal masing-masing unit usaha, dan posisi aktiva, hutang, dan modal masing-masing unit usaha.

Kata kunci: laporan keuangan; penerapan akuntansi, Unit Usaha UNIDA

ABSTRACT

The problems in the business units of Darussalam University (UNIDA) Gontor (canteen and photo copy) have not applied accounting properly and correctly. The absence of financial reports in the form of reports Profit / Loss, Reports changes in Capital and Balance Sheet at both partners. The next problem is the lack of expiration date in the dry food in Unida Gontor canteen. Science and Technology Program for the Society aims to increase the knowledge of business units, in this case is Unair canteen business unit and copy of UNIDA Gontor. Knowledge in question is in terms of application of accounting recording, and preparation of financial statements. Implementation method offered is training and assistance in preparing financial statements. Training and mentoring for this partner is carried out in step: 1). training application of accounting recording properly and correct as well as making of financial report; 2). mentoring and evaluating the implementation of accounting recording and finan-

cial reporting. With the activities of Science Program for the Society, the results obtained are good enough that the result of financial statements in the form of profit / loss report, changes in capital and balance sheet in the canteen business unit and in photo copy business unit plus the minimarket business unit, laundry unit, motorcycle rental business, and armila business unit. This science was planned by two partners but developed into six partners. The six partners of the business units of UNIDA Gontor already have their respective financial statements, which from the financial statements can be known the acquisition of profit or loss of each business unit, changes in capital of each business unit, and the position of assets, debt and capital each business unit.

Keywords: application of accounting; financial statements; unida business units

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha saat ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar. Seorang manajer harus mempunyai strategi yang baik untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta menutupi kelemahan dan mengatasi hambatan yang dihadapi dalam dunia bisnis.

Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, manajemen perusahaan sangat memerlukan informasi yang disajikan sesuai kebutuhannya. Akuntansi merupakan salah satu cara untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar mengambil keputusan strategis.

Akuntansi adalah kegiatan mengidentifikasi, menghimpun, memproses, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi khususnya keuangan suatu organisasi bisnis. Siklus akuntansi dimulai dengan menganalisis transaksi keuangan, selanjutnya dicatat dalam jurnal, diposting ke buku besar, dan dibuat laporan.¹

Laporan yang dihasilkan antara lain: Laporan laba/rugi, Laporan perubahan modal, dan Nera-ca. Semua laporan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemakai informasi, dalam hal ini manajer perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari adanya catatan akuntansi tersebut antara lain: mempermudah pelaksanaan usaha, evaluasi kinerja usaha, perencanaan yang lebih efektif, serta memungkinkan jika ada pemeriksaan dari pihak luar terkait dengan kegiatan usaha kecil tersebut. Namun pada prakteknya, kebanyakan usaha kecil tidak menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengatakan bahwa para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantaranya belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Pengelolaan usaha yang dilakukan dianggap tidak terlalu memerlukan informasi akuntansi.

Pengembangan usaha kecil sangat diperlukan untuk menjadikannya kuat, baik pengembangan yang berkaitan dengan eksternal perusahaan maupun di dalam mengelola internal perusahaan. Dilihat dari sisi internal perusahaan, pengelolaan usaha kecil masih menganggap bahwa proses akuntansi masih tidak terlalu penting untuk diterapkan. Seringkali dalam usaha kecil hasil usaha dikatakan bagus jika jika pendapatan sekarang lebih tinggi daripada pendapatan sebelumnya. Padahal

¹ Renaldo Martin Novianto Hutagaol. *Penerapan Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah*. 25 Oktober 2017. <http://repository.wima.ac.id/840/1/Abstrak.pdf>

indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari pendapatan saja, diperlukan pengukuran dan pengelompokan transaksi atau kegiatan yang terjadi serta pengikhtisaran transaksi-transaksi tersebut.²

Alasan pelaku usaha kecil tidak menggunakan akuntansi antara lain adalah akuntansi dianggap sesuatu yang sulit dan tidak penting. Beberapa pelaku usaha kecil mengatakan bahwa tanpa akuntansi pun perusahaan tetap berjalan lancar dan selalu memperoleh laba. Padahal salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh pengusaha kecil adalah bagaimana mereka memperoleh informasi yang tepat untuk mengambil keputusan bisnisnya. Informasi yang penting untuk pengambilan keputusan bisnis banyak dipengaruhi oleh kondisi keuangan usaha kecil itu sendiri. Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat pada laporan keuangannya, secara umum laporan keuangan merupakan hasil yang diperoleh dari proses akuntansi.

Seperti halnya di unit usaha di Unida Dalam hal ini kantin unida dan fotokopi unida masih belum menerapkan pencatatan akuntansi secara baik dan benar dan juga belum ditemukan adanya laporan keuangan berupa laporan Laba/ Rugi, Laporan Perubahan Modal dan Neraca pada kedua Mitra Tersebut.

Setelah menelaah permasalahan yang ada, serta berdasarkan diskusi dan kesepakatan antara Mitra dengan tim pengabdian masyarakat, maka solusi yang dapat ditawarkan adalah mengadakan pelatihan terhadap penerapan pencatatan akuntansi secara baik dan benar dan melakukan pendampingan, pengevaluasian pelaksanaan pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan secara baik dan benar.

Pencatatan keuangan dirasa perlu untuk mengimbangi pertumbuhan dari usaha ini yang kian tumbuh dan berkembang perlu satu perhatian dalam sistem pencatatan keuangan bagi unit-unit usaha di Unida yaitu kantin Unida dan Foto kopi Unida.

Hal ini penting dilakukan mengingat tumbuh pesatnya usaha kedua unit usaha tersebut. Pencatatan dirasa perlu karena dengan pencatatan keuangan yang baik maka mereka akan mampu memanfaatkannya dalam kelangsungan dari usaha mereka dan juga merupakan edukasi nyata untuk para pengurus Mitra.

1. Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Hasil observasi dilapangan ditemukan bahwa kantin Unida Gontor dan foto copy Unida Gontor belum menerapkan pencatatan akuntansi secara baik dan benar. Belum ditemukan adanya laporan keuangan berupa laporan Laba/ Rugi, Laporan Perubahan Modal dan Neraca pada kedua Mitra Tersebut.
2. Belum ditemukannya masa kadaluarsa di makanan kering yang ada di kantin Unida Gontor.

² Dinarti. *Studi Penerapan Pencatatan Keuangan Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)*. 12 Oktober 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/109215-ID-studi-penerapan-pencatatan-keuangan-bagi.pdf>

2. Solusi Yang Ditawarkan

Setelah menelaah permasalahan yang ada, serta berdasarkan diskusi dan kesepakatan antara mitra dengan tim pengabdian masyarakat, maka solusi yang dapat ditawarkan dalam IbM ini adalah mengadakan pelatihan terhadap penerapan pencatatan akuntansi secara baik dan benar dan melakukan pendampingan dan pengevaluasian pelaksanaan pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan secara baik dan benar.

1. Penyelesaian Masalah Pertama

Permasalahan pertama adalah unit-unit usaha Unida (kantin Unida gontor dan foto kopi Unida Gontor) belum menerapkan pencatatan akuntansi secara baik dan benar. Belum ditemukannya adanya laporan keuangan berupa laporan Laba/Rugi, Laporan perubahan Modal dan Neraca pada kedua mitra tersebut. Langkah yang dilakukan adalah mengadakan pelatihan terhadap penerapan pencatatan akuntansi secara baik dan benar, melakukan pendampingan dan pengevaluasian pelaksanaan pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan secara baik dan benar.

2. Belum ditemukannya masa kadaluarsa di makanan kering yang ada di kantin Unida Gontor.

Langkah yang dilakukan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemberian label masa kadaluarsa.

METODE

Metode pelaksanaan yang ditawarkan ialah pelatihan terhadap penerapan pencatatan akuntansi secara baik dan benar dan melakukan pendampingan dan pengevaluasian pelaksanaan pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan dengan tahapan:

1. Tahapan Persiapan

- a. Survei tempat pelaksanaan kegiatan
- b. Pembuatan Proposal dan penyelesaian administrasi perijinan tempat atau lokasi Pengabdian Pada Masyarakat
- c. Pembuatan modul pelatihan pembuatan program Akuntansi pencatatan keuangan.
- d. Pembuatan atau penyusunan metode pembekalan bagi unit usaha.
- e. Pembuatan materi /memperbanyak modul

2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan setelah semua perijinan dan persiapan peralatan selesai dilakukan. Kegiatan akan dilaksanakan di unit usaha kantin dan foto copy Universitas Darussalam Gontor yaitu di km 6 Siman Ponorogo.

Kegiatan pengenalan dan pelatihan berbeda dengan kegiatan belajar mengajar pada umumnya. Kegiatan pelatihan akan dibuat lebih mudah dipahami oleh Mitra, interaktif learning.

Tabel 1. Kerangka Pelaksanaan Solusi Masalah

Permasalahan	Tujuan Penyelesaian	Solusi	Alat yang diterapkan
1. Penerapan pencatatan akuntansi secara baik dan benar	1. Untuk menyediakan informasi keuangan bagi pengelola usaha	1. Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan dan manfaat penerapan pencatatan akuntansi secara baik dan benar 2. Peserta mampu menerapkan pencatatan akuntansi secara baik dan benar	1. LCD, Proyektor, Materi 2. LCD, Proyektor, Materi
2. Pembuatan Laporan Keuangan (Laporan Laba/ Rugi, Laporan Perubahan Modal, Neraca)	1. Sebagai media informasi atas jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki oleh pengelola usaha dalam suatu periode 2. Menginformasikan jenis dan tingkat jumlah pendapatan yang bisa diraih oleh perusahaan pada periode tertentu. 3. Menunjukkan posisi utang serta modal pada periode tertentu 4. Menunjukkan jumlah beban yang menjadi kewajiban pengelola usaha. 5. Menunjukkan apabila terjadi perubahan pada sisi aktiva maupun passiva dan modal yang dimiliki perusahaan. 6. Sebagai media untuk mengetahui kinerja yang sudah dilakukan perusahaan selama periode tertentu.	1. Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pembuatan laporan keuangan 2. Peserta mampu membuat laporan keuangan sendiri berupa laporan laba/ Rugi, Laporan Perubahan modal Dan Neraca pada unit-unit usaha mitra	3. LCD, Proyektor, Materi 4. LCD, Proyektor, Materi

3. Evaluasi

- a. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat perkembangan program yang dilaksanakan, untuk mengetahui kendala yang ada, cara menanganinya sehingga program pengabdian yang dilakukan benar-benar efektif dan efisien. Di dalam penerapan akuntansi untuk pembuatan laporan keuangan di kantin dan fotokopi Unida ini tidak ada kendala yang berarti karena sebagian besar pengurus adalah mahasiswa dari fakultas ekonomi dan menejemen yang pernah mendapatkan mata kuliah akuntansi.

4. Pembuatan Laporan

- a. Pembuatan Laporan Awal

Pembuatan laporan awal disesuaikan dengan hasil yang telah dicapai selama melakukan pembinaan terhadap unit usaha Unida.

- b. Revisi laporan dilakukan apabila terjadi kesalahan pada pembuatan laporan awal.

- c. Pembuatan Laporan Akhir

Pembuatan laporan akhir dilakukan setelah melakukan revisi laporan agar dalam penyusunan laporan akhir diperoleh hasil yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah menelaah permasalahan yang ada, serta berdasarkan diskusi dan kesepakatan antara mitra dengan tim pengabdian masyarakat, maka solusi yang dapat ditawarkan dalam IbM ini adalah mengadakan pelatihan terhadap penerapan pencatatan akuntansi secara baik dan benar dan melakukan pendampingan dan pengevaluasian pelaksanaan pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan secara baik dan benar.

1. Penyelesaian Masalah Pertama

Permasalahan pertama adalah unit-unit usaha Unida (kantin Unida gontor dan foto kopi Unida Gontor) belum menerapkan pencatatan akuntansi secara baik dan benar. Belum ditemukannya adanya laporan keuangan berupa laporan Laba/Rugi, Laporan perubahan Modal dan Neraca pada kedua mitra tersebut. Langkah yang dilakukan adalah mengadakan pelatihan terhadap penerapan pencatatan akuntansi secara baik dan benar, melakukan pendampingan dan pengevaluasian pelaksanaan pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan secara baik dan benar.

2. Belum ditemukannya masa kadaluarsa di makanan kering yang ada di kantin Unida Gontor.

Langkah yang dilakukan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemberian label masa kadaluarsa.

Sasaran Pelaksanaan Kegiatan

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah para pengurus unit-unit usaha di Unida Gontor (Kantin Unida Gontor Dan foto kopi Unida Gontor) yang sebagian besar terdiri dari Mahasiswa Unida Gontor yang masih aktif dan Mahasiswa yang telah diwisuda (Masa Pengabdian)

Keterkaitan Program dengan Mitra

Keterkaitan antara program IbM dengan Mitra adalah adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Bagi tim pelaksana program IbM, kegiatan ini merupakan penerapan hasil-

hasil penelitian perguruan tinggi. Bagi Mitra dapat memperoleh manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan berdasar IbM yang telah dilakukan oleh Pengusul.



Gambar 1. Skema Kegiatan PKM

SIMPULAN

Dengan kegiatan Program Ipteks bagi Masyarakat ini, diperoleh hasil yang cukup baik yaitu dihasilkannya laporan keuangan berupa laporan laba/rugi, laporan perubahan modal dan neraca di unit kantin Unida dan di unit usaha foto copy di tambah dengan unit usaha laundry unit usaha persewaan sepeda motor, dan unit usaha armila. Ipteks ini direncanakan dua mitra tetapi berkembang menjadi enam mitra. Keenam mitra unit-unit usaha Unida tersebut sudah mempunyai laporan keuangan masing-masing dimana dari laporan keuangan tersebut bisa diketahui perolehan laba atau rugi masing-masing unit usaha, perubahan modal masing-masing unit usaha Unida, dan posisi aktiva, hutang, dan modal masing-masing unit usaha Unida. Peningkatan kemampuan dalam pencatatan serta informasi yang lebih cepat akurat dalam hal perolehan laba, naik turunnya permodalan, dan posisi aktiva hutang dan modal masing-masing unit usaha.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih tim Pengabdian Masyarakat sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Darussalam Gontor yang telah memberikan rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan Pengabdian bagi Masyarakat tahun 2017.
2. Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat yang selalu membimbing kegiatan Pengabdian bagi Masyarakat di Universitas Darussalam Gontor tahun 2017.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen yang membimbing pelaksanaan kegiatan Pengabdian bagi Masyarakat tahun 2017.
4. Seluruh tim pelaksana, manajer unit-unit usaha Universitas Darussalam Gontor maupun mahasiswa yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian bagi Masyarakat tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Golrida, K. 2008. *Akuntansi Usaha Kecil untuk Berkembang*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Dinarti. *Studi Penerapan Pencatatan Keuangan Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)*. 12 Oktober 2017.
<https://media.neliti.com/media/publications/109215-ID-studi-penerapan-pencatatan-keuangan-bagi.pdf>
- Renaldo Martin Novianto Hutagaol. *Penerapan Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah*. 25 Oktober 2017. <http://repository.wima.ac.id/840/1/Abstrak.pdf>.
- Ferly Progresif. *Peran Akuntansi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. 1 Oktober 2017.
<https://www.blogger.com/dyncss/authorization.css?targetBlogID=8969071152854207796&zx=3553d226-5243-48da-a278-9eea8c9de16d' rel='stylesheet'>>
- Nuhidayati. *Penerapan Siklus Akuntansi Untuk Meningkatkan Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. 16 Oktober 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/75446-ID-penerapan-siklus-akuntansi-untuk-meningkatkan-jumlah-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.pdf>

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i1.1420>

Membangun Infrastruktur Jaringan RT RW Net Guna Mendukung Aplikasi Sistem Informasi Desa (SIMADES)

***Build Network Infrastructure RT/RW Net to
Support The Application of Village Information System
(SIMADES)***

Shoffin Nahwa Utama^{*}, Aziz Musthafa

Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor,
Jawa Timur, Indonesia

*Penulis Korespondensi: shoffin@unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Program kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema membangun infrastruktur jaringan RT/RW Net di Desa Sekaran, Kec. Siman, Kab. Ponorogo guna mendukung aplikasi SIMADES memiliki tujuan: 1) Masyarakat Desa Sekaran mengetahui manfaat penggunaan teknologi informasi; 2) Perangkat desa lebih mudah dan cepat mengakses informasi; 3) Memudahkan proses pelaporan berbasis online oleh perangkat desa; 4) Memudahkan dan mempercepat pelayanan berbasis online menggunakan Sistem informasi desa. Guna mencapai tujuan dari pengabdian masyarakat ini, tim dosen dibantu mahasiswa telah melaksakan beberapa kegiatan berupa pemasangan tower antena yang dijadikan pusat RT/RW Net di balai Desa Sekaran, pemetaan rumah perangkat desa yang akan dipasang antena penerima, instalasi antena pemancar dan penerima disetiap titik yang telah direncanakan. Setelah kegiatan tahap pertama selesai dilakukan evaluasi guna memperoleh feedback dari pihak desa. Dari kegiatan instalasi infrastruktur jaringan RT/RW Net didapatkan respon yang sangat positif dari semua perangkat desa sekaran, sebagian besar yang telah berusia diatas 50 tahun dapat dengan mudah menggunakan beberapa media sosial dan juga menggunakan sistem informasi yang telah ada.

Kata kunci: jaringan; rt/rw net; simades

ABSTRACT

People empowerment program with theme " Building RT RT RW Net network infrastructure in the village of Sekaran. Siman Kab. Ponorogo to support the SIMADES application has a purpose 1) The villagers of sekaran know the benefits of using information technology 2) Village officials are easier and quicker to access information 3) Facilitate online reporting process to village officials 4) Facilitate and speed up online-based services using the village information system. In order to achieve the goal of community service, the team of lecturers in the auxiliary students has been performing some activities in the form of installation of antenna tower which is used as RT / RW Net center in the village office of Sekaran, mapping of the village officials' house to be installed the receiving antenna, installation of transmitting and receiving antennas at each point that has been planned. After the first phase of the activity is completed an evaluation to obtain feedback from the village. From the installation activity of network infrastructure rt rw net got very positive response from all device of village now, most of those over the age of 50 can easily use some social media and also use existing information systems.

Keywords: network; rt/rw net; simades

PENDAHULUAN

Desa sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan administratif di Indonesia, dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dan terus meningkatkan kemampuannya di dalam mengelola data administrasi kependudukan desa sebagaimana yang terkandung dalam amanat Inpres No. 3 tahun 2003.¹ Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar tapi mengarah pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Proses pembangunan pedesaan kemudian semakin mengurangi ketergantungan pada peran pemerintah, sebab masyarakat pedesaan semakin berdaya dan kreatif dalam mengembangkan inovasi.²

Sumber daya manusia didesa cenderung tertinggal dalam hal perkembangan teknologi informasi. Tentu saja pemenuhan tuntutan, keinginan dan kebutuhan masyarakat lewat pemberian pelayanan publik yang berkualitas, hanya akan dapat dilaksanakan dengan optimal jika pemberi pelayanan publik dalam hal ini perangkat desa, memiliki kualitas sumber daya dan sarana prasarana yang berkualitas. Kedua hal tersebut saling kait-mengait dan tunjang-menunjang. Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan berkualitas tidak akan berarti apa-apa jika tidak ditunjang oleh sarana Prasarana yang memadai. Sementara sarana dan Prasarana yang lengkap dan paripurna akan lumpuh tanpa dukungan kualitas SDM yang mumpuni.

Sebagai bagian dari kinerja pelayanan publik, sarana dan prasarana yang modern dan selalu *up to date* menjadi sokoguru utama dalam menjamin keterlaksanaan dan suksesnya pelayanan publik. Karena itu, dapat dipastikan bahwa pelayanan publik tidak akan dapat berjalan atau akan terhambat tanpa dukungan sarana dan Prasarana yang baik dan berkualitas. Padahal saat ini pelayanan publik merupakan ukuran tingkat kinerja birokrasi pemerintahan. Dwiyanto mengemukakan bahwa isu peningkatan mutu pelayanan publik merupakan isu hangat dalam era pembangunan dewasa ini. Pelayanan publik merupakan isu sentral yang menentukan keberhasilan setiap lembaga pemberi pelayanan.³ Hal yang sama dikemukakan pula oleh Nicholas yang mengatakan bahwa bahwa pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian kualitas administrasi pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Baik tidaknya administrasi publik atau pemerintah dilihat seberapa jauh pelayanan publiknya itu sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat.⁴

METODE

Paradigma pembangunan pedesaan yang dibangun melalui Gerakan Desa Membangun dilakukan dengan beberapa tahapan:⁵

1. Mengembangkan jaringan informasi pedesaan berbasis internet dengan membangun website desa-desa dengan domain *desa.id*;

¹ Arifin Noor Asyikin, “Pengukuran Tingkat Kesiapan Kantor Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Masterplan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Perkantoran Desa Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 4.1,” *Jurnal Poros Teknik Vol 7, No 2 (2015)* vol 7, no. No .2 (2015).

² Muhammad Badri, “Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun),” *RISALAH Vol. 27*, no. No. 2 (n.d.).

³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas gajah Mada, 2005).

⁴ Nicholas Henry, *Administrasi Negara Dan Masalah Publik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995).

⁵ Y Suparyo, “Presentasi Gerakan Desa Membangun,” n.d.

2. Mendorong desa mandiri teknologi dengan migrasi ke teknologi *open source*;
3. Meningkatkan pelayanan publik dengan aplikasi mitra desa;
4. Mengelola sumber daya berdasarkan profil desa dengan survei sumber daya dan data geospasial dengan aplikasi lumbung desa (lihat: mitra.or.id);
5. Membangun desa dengan interkoneksi sistem dan regulasi yang mendukung desa untuk mengambil inisiatif pembangunan.

Merujuk paradigma diatas, meletakkan tahapan pertama yaitu membangun dan mengembangkan jaringan omuniiasi berbasis internet adalah prioritas utama dalam pengabdian masyarakat tahap awal ini.

Guna merealisasikan tujuan yang ingin dicapai pada program pengabdian masyarakat di desa Sekaran kec Siman dilakukan beberapa tahap pelaksanaan, pertama tim dosen Universitas Darus-salam (UNIDA) Gontor berdiskusi dengan semua perangkat desa guna mensosialisasikan program pengabdian masyarakat dari UNIDA Gontor serta memperoleh data serta masukan terkait rencana program dari semua perangkat desa, tahap selanjutnya tim dosen dan perangkat desa melakukan pemetaan lokasi pemasangan perangkat jaringan yang akan digunakan.

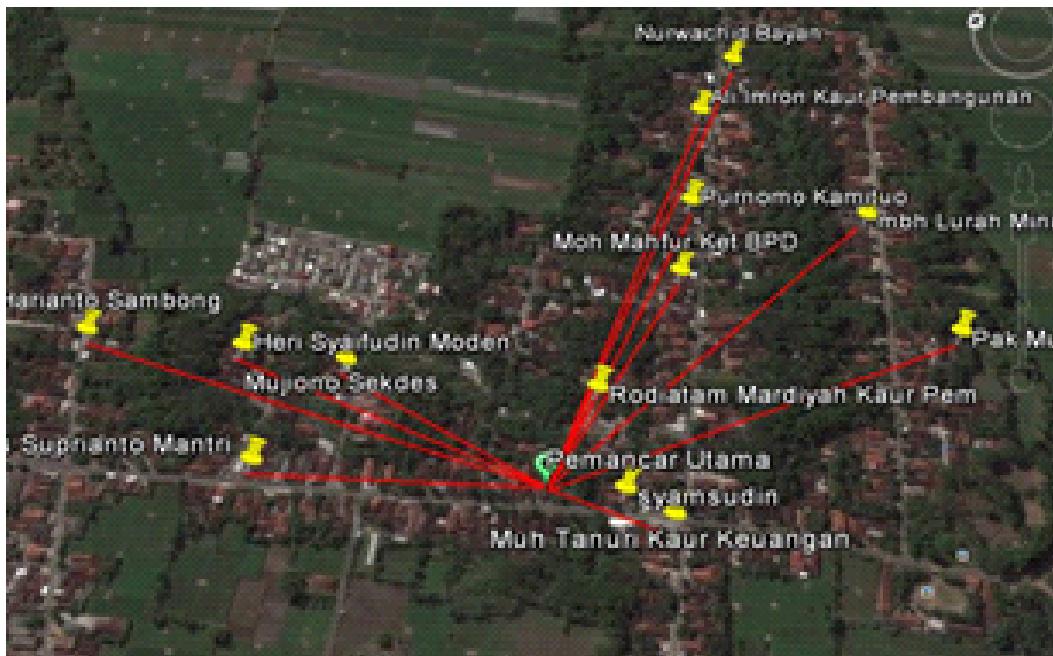
Setelah pemetaan selesai tahap selanjutnya tim dosen dibantu mahasiswa melakuakan instalasi perangkat RT/RW Net dibalai desa dan dirumah yang sudah ditentukan pada pemetaan sebelumnya. Ketika semua perangkat sudah terpasang dan tersetting dengan baik dilakukan uji koneksi RT/RW Net selama 1 minggu untuk mengetahui kualitas sinyal dan kecepatan transfer data yang diperoleh disetiap poin penerima.

Selanjutnya perangkat desa diberikan pelatihan mengenai penggunaan perangkat jaringan RT/RW Net. Setelah tahap pemasangan infrastruktur jaringan RT/RW Net selesai dilaksanakan. Kriteria keberhasilan program tahap awal pemasangan infrastruktur jaringan RT/RW Net adalah semua perangkat bisa mampu mengakses dan menggunakan teknologi informasi berbasis online guna mendapatkan informasi terbaru.

Setelah tahap pertama selesai dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, dengan adanya kegiatan monitoring diharapkan dapat memberikan arahan, bimbingan dalam penggunaan dan pemeliharaan jaringan RT/RW Net. Evaluasi dilakukan untuk memberikan masukan apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, sehingga dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh tim prodi teknik informatika UNIDA Gontor, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra dan mencapai tujuan program di Desa Sekaran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dilakukan pemetaan awal mengenai tipologi dan kondisi alam yang ada di daerah Sekaran. Pada saat pemetaan dan survei melibatkan beberapa perangkat desa guna memperoleh data yang presisi. Data hasil pemetaan bisa dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Pemetaan area yang RT/RW Net

Dari hasil pemetaan didapatkan 13 titik area yang akan dipasang antena guna menjangkau RT/RW Net. Namun wilayah didesa Sekaran masih banyak pepohonan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tiang utama setinggi 20 meter yang digunakan tempat meletakkan antena omni sebagai pemancah utama dari Balai desa. Pemancah utama menggunakan akses *point Mikrotix Groove 52HPn* dengan antena *omni directional* yang memiliki jangkauan radius 2 km jika tanpa halangan.



Gambar 2. Hasil pemasangan tiang dan pemancah utama di balai desa Sekaran

Pada posisi penerima menggunakan 2 jenis perangkat disesuaikan dengan jarak dan lokasi rumah, untuk rumah yang jaraknya dibawah 500 meter menggunakan AP *outdoor TL WR7210N* dan untuk jarak diatas 500 meter menggunakan *ap outdoor mikrotik SXT-2ndr*. Guna menyebarluaskan di

sekitar rumah digunakan ap indoor WR740N buatan tp-link.

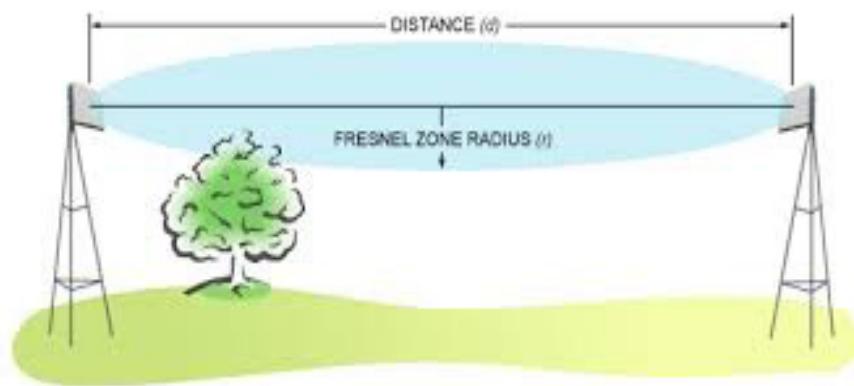


Gambar 3. Perangkat dari kiri Groove 52hp, sxt-2ndr, WR7210N, dan WR740N

Dalam beberapa kasus pemasangan perangkat memerlukan perhitungan *fresnel zone* karena adanya pohon yang menghalangi. Berikut adalah rumus untuk menghitung *fresnel zone* yang pertama:

$$r = 17.31 * \sqrt{((d_1 * d_2) / (f * d))} \dots [5]$$

dimana r adalah jari-jari dari zone tersebut dalam meter, d1 dan d2 adalah jarak dari penghalang ke kedua ujung dari sambungan wireless, d adalah jarak total sambungan dalam meter, dan f adalah frekuensi dalam MHz. Untuk menghitung ketinggian dari atas tanah, kita perlu mengurangi dari ketinggian garis lurus antara dua tower wireless yang saling berhubungan.



Gambar 4. Area fresnel Zone

(<https://www.loxcel.com/cellular-services-news-2015.html>)

Pada sebuah kasus di Desa Sekaran rumah Pak Nur Wahid (Bayan) berjarak 800 meter dari kantor desa, namun jarak 200 meter dari kantor terdapat kumpulan pohon bambu dengan tinggi rata-rata 8 meter. Sambungan wireless menggunakan frekuensi 2.437 MHz (802.11b kanal 6), maka perhitungan fresnel zone sebagai berikut:

$$r = 17.31 * \text{sqrt}((200*600)/(2.437*800))$$

$$r = 17.31 * \text{sqrt}(120000/1949600)$$

$$r = 4,29 \text{ Meter}$$

Sehingga dengan tower di balai desa dengan tinggi 20 meter, maka *fresnel zone* yang pertama akan berada 15 meter diatas tanah. Dari data perhitungan tersebut kami membuat tiang tempat antena AP setinggi 17 meter pada rumah Pak Bayan guna mendapatkan koneksi yang lancar.

Pemasangan perangkat pada 13 titik rumah dilakukan selama 6 hari, sementara pemasangan tower pada kantor desa dibantu oleh warga desa yang memiliki usaha bengkel las karena harus memasang sling dan menyambung 3 ruang pipa besi yang total panjang 20 meter.

Penggunaan akses internet dengan banyak pengguna akan mengakibatkan turunnya *performance* jaringan dimana sebagian pengguna akan mendominasi pemakaian *bandwidth* sedangkan sebagian yang lain sulit untuk mendapatkan *bandwidth* yang semestinya diperoleh. Pengaturan *bandwidth* perlu diterapkan sedemikian rupa sehingga setiap pengguna bisa mendapatkan *bandwidth* dengan semestinya sesuai dengan rancangan yang dikehendaki.⁶

Jaringan yang dirancang menggunakan tipologi *Point to Multipoint* dimana satu perangkat akses *point* yang dapat disambungkan ke banyak perangkat lainnya. Seperti digambarkan pada gambar 4 berikut ini :



Gambar 5. Topologi Point to Multipoint jaringan desa Sekaran

Dalam waktu 7 hari semua perangkat berhasil di pasang dengan baik dan dalam jangka waktu 2 minggu uji coba hanya ada 3 perangkat yang bermasalah dalam hal koneksinya, sehingga memerlukan pengaturan ulang posisi pointing antena.

Perangkat desa juga kami berikan pelatihan mengenai pemanfaatan RT/RW Net serta tatacara pemakaian, perawatan serta *troubleshooting* perangkat jaringan yang digunakan. Sehingga kedepan bisa mandiri dalam hal pemeliharaan dan perbaikan perangkat RT/RW Net di Desa Sekaran.

⁶ Muhamad Nugraha and Shoffin Nahwa Utama, "MATIC - Manajemen Bandwidth Dengan HTB" (Jurnal Matics, 2017).



Gambar 6. Pelatihan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur RT/RW Net bagi perangkat Desa Sekaran

Dari kegiatan instalasi infrastruktur jaringan RT/RW Net didapatkan respon yang sangat positif dari semua perangkat desa sekaran, sebagian besar yang telah berusia diatas 50 tahun dapat dengan mudah menggunakan beberapa media sosial dan juga menggunakan sistem informasi yang telah ada.

Sebagai tolak ukur tingkat kepuasan, digunakan angket kepada perangkat desa sekaran sebagai responden. Hasil yang didapat dilapangan, tingkat kepuasan atas pengabdian masyarakat yang telah dilakukan sebesar 90,7%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sesuai dengan keinginan perangkat desa. Selain hal tersebut keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat juga telah diukur dari sebaran angket dengan prosentasi sebesar 91%.

SIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan RT/RW Net guna penyebaran akses internet didesa sekaran merupakan metode yang efisien melihat topologi desa yang tersentral, antusiasme masyarakat yang baik membuat manfaat yang didapatkan masyarakat juga bisa langsung dirasakan mulai dari biaya yang lebih murah serta akses informasi menjadi semakin mudah.

Kedepan edukasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi perlu dilakukan dengan sasaran generasi muda usia sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas guna memberikan informasi dampak positif dan negatif dari sebuah teknologi informasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Diucapkan terimakasih untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNIDA Gontor dan Desa Sekaran yang dengan terbuka memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Noor Asyikin*, Pengukuran Tingkat Kesiapan Kantor Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Masterplan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Perkantoran Desa Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 4.1.Jurnal Poros Teknik Vol 7, No 2 (2015). Pltek Negeri Banjarmasin
- Muhammad Badri. Pembangunan pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun). Jurnal RISALAH, Vol. 27, No. 2, Desember 201: 62-73
- Agus Dwiyanto. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas gajah Mada. 2005.
- Nicholas Henry. Administrasi Negara dan Masalah Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1995
- Suparyo, Y. (2013). Presentasi Gerakan Desa Membangun. Sumber: http://www.slideshare.net/yossy_suparyo/presentasi-gerakan-desa-membangun?redirected_from=save_on_embed. Diakses 18 Juli 2017.
- Muhamad Nugraha and Shoffin Nahwa Utama, “MATIC - Manajemen Bandwidth Dengan HTB” (Jurnal Matics, 2017)

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i1.1421>

Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani

Application of Halal Assurance System on UKM Field of Animal Food Processing

Tian Nur Ma'rifat*, Maya Sari

Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis Korespondensi: tiannurm39@gmail.com

ABSTRAK

Halal merupakan syarat utama bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan. Sistem jaminan halal merupakan mekanisme yang harus diterapkan oleh produsen jika mereka ingin mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia). Permasalahan yang dialami oleh usaha kecil menengah saat ini di Kabupaten Ponorogo adalah belum ada sertifikasi halal dari LPPOM MUI pada RPA (Rumah Pemotongan Ayam) dan sebagian besar UKM di Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan jumlah UKM bidang pangan di Kabupaten Ponorogo yang bersertifikat halal melalui pendampingan penerapan Sistem Jaminan Halal. Mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Asese Food dan Pentol Bakso "Bumbu Kacang". Asese Food merupakan rumah produksi yang menjual produk diantaranya adalah abon sapi, bakso, bakso krispi, tahu bakso, dan pempek. Mitra kedua yaitu pentol bakso "saos kacang". Pentol bakso "Saos Kacang" merupakan unit usaha yang memproduksi pentol bakso yang dijual dalam bentuk outlet. Kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari dua tujuan antara lain pendampingan dan sosialisasi penerapan Sistem Jaminan Halal dan pendampingan pengajuan dokumen sertifikasi halal ke LPPOM MUI Jawa Timur. Hasil dari kegiatan ini adalah kesadaran dari unit usaha mitra untuk menerapkan sistem jaminan halal pada usahanya dan terdaftarnya unit usaha dalam proses sertifikasi halal ke LPPOM MUI. Saran terhadap keberlanjutan program adalah adanya sosialisasi secara menyeluruh terhadap asosiasi pedagang ataupun produsen produk pangan mengenai pentingnya sertifikasi halal dan adanya kerjasama antara akademisi dengan lembaga sertifikasi halal terkait kepengurusan sertifikat halal.

Kata kunci: Sistem Jaminan halal; pangan; sertifikasi

ABSTRACT

Halal is a major requirement for Muslim consumers in consuming food products. Halal assurance system is a mechanism that must be applied by producers if they want to apply halal certification to LPPOM MUI (Halal Certification Body in Indonesia). Problems occurred by small medium enterprise currently in Ponorogo regency is there is no halal certification from LPPOM MUI in slaughterhouse in Ponorogo. The purpose of this program is to increase the number of halal certified food SMEs in the region of Ponorogo through accompaniment of Halal Assurance System Implementation. Partners of this community development program are Asese Food and Meatballs Foodstall named "Pentol Saos Kacang". Asese Food is a production house that sells meat processed food, for instance: meatballs, crispy meatballs, tofu meatballs, and pempek. The second partner is Meatballs

Foodstall "Pentol Saos Kacang". This is a business unit that produce meatballs sold in the of outlets. This community service activity consists of two purposes such as socialization and accompaniment of halal assurance system implementation and submission of halal certification document to LPPOM MUI. The result of this program is the awareness of the business unit to implement the halal assurance system. Suggestion for the sustainability of the program is a comprehensive dissemination of halal products and services and cooperation between academicians and halal certification body related to halal certificate management.

Keywords: halal guarantee system; food; certification halal guarantee system.

PENDAHULUAN

Halal merupakan syarat utama bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan. Kehalalan produk pangan ditentukan dari kesesuaian proses, bahan baku hingga transportasi dari tahap hulu ke hilir produk sampai ke tangan konsumen.

Produk halal saat ini memiliki pangsa pasar yang besar dan terus berkembang. Hal itu dibabkan karena pertumbuhan populasi muslim sebanyak 1,8 miliar pada tahun 2015 dan Asia Pasifik mendominasi pasar dengan menyumbang USD 594 miliar pada tahun 2016, dengan basis konsumen yang besar di banyak negara seperti Pakistan, Indonesia, Bangladesh dan India dengan populasi Muslim yang tertinggi (Cooper, 2017).¹

Sistem jaminan halal merupakan mekanisme yang harus diterapkan oleh produsen jika mereka ingin mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal. Pengakuan atas jaminan halal dibutuhkan oleh produsen sebagai jaminan untuk keamanan pangan, kualitas dan karakteristik penting lain yang tidak hanya dinikmati oleh konsumen muslim tetapi juga konsumen non muslim².

Permasalahan yang dialami oleh usaha kecil menengah saat ini di Kabupaten Ponorogo khususnya yang bergerak di bidang pangan hewani adalah belum ada sertifikasi halal pada RPA (Rumah Pemotongan Ayam) atau RPH (Rumah Pemotongan Hewan) sehingga diperlukan penelusuran mengenai tata cara dan prosedur pengolahan daging dari awal hingga ke tangan konsumen. Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo (2016) menyebutkan bahwa jumlah pedagang daging ayam yang sekaligus melakukan pemotongan ayam berjumlah 68 unit. Dari sejumlah pedagang tersebut, belum ada yang tersertifikasi halal dari LPPOM MUI³.

Mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat mengenai Penerapan Sistem Jaminan Halal pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani adalah Asese Food dan Pentol Bakso "Bumbu Kacang".

Asese Food merupakan rumah produksi yang menjual produk olahan daging sapi yang dikelola oleh Bapak Lukman Efendi. Rumah produksi ini terletak di Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Produk yang dihasilkan oleh Asese Food diantaranya adalah abon sapi, bakso, bakso

¹ Steve Cooper,(2017), "Halal Food Market Size and Forecast, By Application (Processed Food & Beverages, Bakery Products and Confectionary), and Trend Analysis, 2014 – 2024", bersumber dari website <https://www.hexaresearch.com>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017.

² Baharuddin, K., Kassim, N. A., Nordin, S. K., & Buyong, S. Z. (2015). Understanding the halal concept and the importance of information on halal food business needed by potential Malaysian entrepreneurs. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 5(2), 170.

³ Bersumber dari database Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, (2017). Data Pedagang Daging Ayam di Kabupaten Ponorogo.

krispi, tahu bakso, dan pempek. Mitra kedua yaitu pentol bakso “saos kacang”. Pentol bakso “Saos Kacang” merupakan unit usaha yang memproduksi pentol bakso yang dijual dalam bentuk outlet. Pemiliknya adalah Bapak Purwanto. Dalam pelaksanaan produksinya, kedua perusahaan mitra belum menerapkan sistem jaminan halal dikarenakan keterbatasan informasi produsen mengenai ketentuan-ketentuan teknis yang diterapkan dalam Sistem Jaminan Halal.

Melihat permasalahan yang dihadapi mitra serta melihat tingkat urgensi dari masing-masing faktor tersebut, maka solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Permasalahan dan Solusi Program Pengabdian Masyarakat

Permasalahan	Solusi
Belum ada sertifikasi halal dari LPPOM MUI yang dapat memberikan jaminan halal bagi konsumen	Pendampingan untuk penerapan Sistem Jaminan Halal dari LPPOM MUI di Rumah Produksi Asese Food dan Pentol bakso “Saos Kacang”
	Pendampingan pengajuan dokumen sertifikasi halal ke LPPOM MUI Jawa Timur

Pada aspek pendampingan penerapan Sistem Jaminan Halal dihasilkan rangkaian rekomendasi perbaikan bahan dan proses serta dokumen penerapan Sistem jaminan Halal HAS 23000 sehingga nantinya sertifikasi halal dari LPPOM MUI dapat diperoleh.

METODE

Kegiatan utama dalam pengabdian masyarakat ini adalah pendampingan untuk persiapan proses sertifikasi Halal LPPOM MUI, yang terbagi dalam 2 tujuan antara lain :

1. Pendampingan untuk penerapan Sistem Jaminan Halal
2. Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal ke LPPOM MUI Jawa Timur

Dari tujuan tersebut diturunkan dalam beberapa tahapan kegiatan antara lain :

1. Tahap Awal

Kegiatan persiapan yang dilaksanakan kepada mitra melalui Sosialisasi Penerapan Sistem Jaminan Halal. Pada tahap sosialisasi ini dijelaskan mengenai pentingnya sertifikasi halal pada perusahaan pangan untuk dapat bersaing di pasar dan penjelasan secara garis besar mengenai sistem jaminan halal.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam pendampingan untuk penerapan Sistem Jaminan Halal dan pengajuan sertifikasi halal antara lain :

- a. Identifikasi Jenis Produk yang akan Disertifikasi
- b. Identifikasi Bahan Baku dari Produk yang akan Disertifikasi
- c. Identifikasi Alur Proses Produksi
- d. Penerapan Teknis Sistem Jaminan Halal
- e. Penyusunan Dokumen Sistem Jaminan Halal

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahapan monitoring dilakukan melalui komunikasi langsung dengan pemilik usaha sekaligus pelaksana program. Evaluasi penerapan sistem jaminan halal dilaksanakan dengan observasi lapangan ke tempat produksi setelah pelaksanaan pendampingan sehingga dapat dilihat apakah perusahaan menerapkan Sistem Jaminan Halal dengan tepat sesuai dengan pendampingan teknis yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perusahaan Mitra Asese Food

Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan tahapan penerapan Sistem Jaminan Halal di rumah produksi Asese Food antara lain :

- Sosialisasi Penerapan Sistem Jaminan Halal

Sosialisasi penerapan Sistem Jaminan Halal dilakukan kepada pemilik usaha Asese Food dengan cara dialog mengenai pentingnya penerapan sistem jaminan halal dalam pengembangan usaha produk pangan dan besarnya potensi pasar dari produk yang telah tersertifikasi halal di Kabupaten Ponorogo.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi pada Pemilik Asese Food

- Identifikasi Jenis Produk yang akan Disertifikasi

Produk yang akan disertifikasi adalah produk yang memiliki bahan baku yang masuk dalam bahan kritis menurut LPPOM MUI.

Produk yang direncanakan akan disertifikasi terlebih dahulu adalah bakso dan tahu bakso. Hal ini ditetapkan karena jumlah produksi untuk kedua produk tersebut yang paling tinggi dan memiliki sebaran konsumen yang paling besar. Berikut adalah gambar produk yang dihasilkan oleh Asese Food.



Gambar 1. Tahu Bakso



Gambar 2. Bakso

- Identifikasi Bahan Baku dari Produk yang akan Disertifikasi

Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi bahan baku yang terlibat selama proses produksi. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada bahan-bahan yang masuk dalam daftar bahan kritis dari LPPOM MUI. Bahan yang masuk dalam daftar bahan kritis LPPOM MUI harus dipastikan status kehalalannya dengan cara mengecek ada atau tidaknya sertifikasi halal. Jika bahan tersebut tidak tercantum sertifikat halal, maka harus dicek lagi ke belakang apakah selama proses atau pengadaan bahan tersebut tercampur bahan haram ataupun tidak.

Dari hasil identifikasi bahan baku yang digunakan oleh Asese Food, bahan tambahan yang menjadi titik kritis antara lain :

- daging sapi
- bahan pengenyal

Bahan pengenyal yang digunakan setelah dicek sudah tersertifikasi halal. Untuk bahan baku daging sapi yang digunakan, pemilik telah menjamin daging sapi berasal dari penyembelihan sapi yang disebelih di peternakan yang telah sesuai dengan syariat islam.

Dalam upaya penerapan Sistem Jaminan Halal pada perusahaan Asese Food, perbaikan pada tahap bahan baku antara lain :

- Memilih tempat penyembelihan sapi yang memenuhi syariat islam melalui observasi lapangan oleh pemilik Asese Food
- Melakukan penggilingan daging sapi secara mandiri oleh pegawai pada perusahaan Asese Food sehingga terhindar dari cemaran daging yang belum terjamin kehalalannya
- Melakukan proses pengolahan daging sapi dari penyembelihan hingga ke pembuatan bakso dan makanan olahan lainnya pada satu hari sehingga mencegah kontaminasi dan penurunan kualitas daging

- Identifikasi Alur Proses Produksi

Identifikasi alur proses produksi dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi alur proses dalam pembuatan bakso sehingga setiap tahapan proses dari bahan baku hingga produk jadi telah memenuhi ketentuan Sistem Jaminan Halal. Alur proses produksi secara garis besar dalam pembuatan bakso antara lain :



Gambar 3. Diagram Alir Proses Pembuatan Bakso

- Penerapan Teknis Sistem Jaminan Halal

Sistem Jaminan Halal mencakup 11 kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan⁴. Kriteria Sistem Jaminan Halal antara lain :

1. Kebijakan Halal
2. Tim Manajemen Halal
3. Pelatihan dan Edukasi
4. Bahan
5. Produk

⁴ Majelis Ulama Indonesia, (2008), “Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI”, bersumber dari website <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017.

6. Fasilitas Produksi
7. Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis
8. Kemampuan Telusur
9. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria
10. Audit Internal
11. Kaji Ulang Manajemen

Pendampingan penerapan teknis Sistem Jaminan Halal di perusahaan Asese Food dilaksanakan dengan menggunakan metode *on site training* yaitu pelatihan dilaksanakan langsung di lokasi produksi dengan melibatkan karyawan sekaligus pemilik dari Asese Food.

- Penyusunan Dokumen Sistem Jaminan Halal

Setelah melakukan identifikasi bahan baku dan proses dan dilihat tidak ada yang termasuk dalam titik kritis dalam penerapan sistem jaminan halal, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun dokumen Manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan dari LPPOM MUI. Adapun Manual SJH dari Asese Food adalah terlampir.

B. Perusahaan Mitra Pentol “Saus Kacang”

Langkah-langkah dalam tahapan penerapan sistem jaminan halal di rumah produksi Pentol Bakso “Saos Kacang” antara lain :

- Sosialisasi Penerapan Sistem Jaminan Halal

Sosialisasi penerapan Sistem Jaminan Halal dilakukan kepada pemilik usaha dengan cara dialog mengenai pentingnya penerapan sistem jaminan halal dalam pengembangan usaha produk pangan dan besarnya potensi pasar dari produk yang telah tersertifikasi halal di Kabupaten Ponorogo.



Gambar 4. Sosialisasi Penerapan SJH pada Pengusaha Pentol “Saus Kacang”

- Identifikasi Jenis Produk yang akan Disertifikasi

Produk yang akan disertifikasi adalah produk yang memiliki bahan baku yang masuk dalam bahan kritis menurut LPPOM MUI.

Dari hasil identifikasi bahan baku yang dilakukan diperoleh data bahwa bahan baku yang masuk ke dalam daftar bahan kritis yang perlu diperhatikan status kehalalannya adalah campuran daging sapi dan ayam. Adonan daging tersebut diperoleh pemilik dengan membeli daging di Pasar Songgolangit. Daging yang dibeli dari Pasar Songgolangit belum memiliki serti-

fikat halal. Tahap selanjutnya setelah pembelian daging dari pasar adalah penggilingan yang dilakukan di tempat penggilingan yang belum tersertifikasi halal. Selain tempat penggilingan yang belum tersertifikasi halal, proses penggilingan tidak dapat dijamin bebas dari cemaran daging yang tidak halal. Dari hasil penelusuran tersebut, produk pentol saus kacang tidak dapat disertifikasi halal dikarenakan ada bahan baku yang termasuk dalam bahan kritis dan tidak dapat ditelusuri status kehalalannya.

Dalam proses komunikasi dan pengkondisian dengan perusahaan mitra, perusahaan tidak mampu mengganti sumber bahan baku daging sapi dan daging ayam yang dapat dijamin kehalalannya sehingga tidak dimungkinkan untuk penerapan Sistem Jaminan Halal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari kegiatan ini adalah kesadaran dari unit usaha mitra untuk menerapkan sistem jaminan halal pada usahanya dan diterapkannya sistem jaminan halal pada proses produksi.

Kendala selama pelaksanaan kegiatan adalah tidak adanya penyembelihan dan penggilingan yang telah bersertifikat halal sehingga menghambat penerapan Sistem Jaminan Halal pada perusahaan mitra serta pengurusan sertifikat halal ke LPPOM MUI. Selain itu, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap rawannya cemaran dari bahan haram ke produk yang diolah.

Saran terhadap keberlanjutan program antara lain :

1. adanya sosialisasi secara menyeluruh terhadap asosiasi pedagang ataupun produsen produk pangan mengenai pentingnya menjamin kehalalan produk melalui sertifikasi halal
2. adanya kerjasama antara akademisi dengan lembaga sertifikasi halal terkait kepengurusan sertifikat halal dari usaha kecil menengah yang ada di daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Darussalam Gontor sebagai pemberi hibah dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat sehingga program ini dapat terlaksana. Selain itu ucapan terima kasih kepada pemilik perusahaan mitra Asese Food Bapak Lukman Efendi dan perusahaan mitra Pentol "Saus Kacang" Bapak Purwanto atas kerja samanya dalam pelaksanaan program Penerapan Sistem Jaminan Halal Halal pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, K., Kassim, N. A., Nordin, S. K., & Buyong, S. Z. (2015). Understanding the halal concept and the importance of information on halal food business needed by potential Malaysian entrepreneurs. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 5(2), 170.
- Cooper, Steve. (2017). Halal Food Market Size and Forecast, By Application (Processed Food & Beverages, Bakery Products and Confectionary), and Trend Analysis, 2014 – 2024. Retrieved from <https://www.hexaresearch.com>.
- Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, (2017). Data Pedagang Daging Ayam di Kabupaten Ponorogo. Retrieved from *unpublish database*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI. Retrieved from <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>.

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i1.1422>**Pelatihan Budidaya Cacing Tanah Lumbricus
Di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo*****Trainning on Lumbricus Worm Cultivation at
Pudak District Ponorogo City*****Use Etica, Lutfy Ditya Cahyanti***Prodi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Darussalam Gontor,
Jawa Timur, Indonesia

*Penulis Korespondensi: lutfyditya@unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah petani desa Pudak Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Kegitan pengabdian masyarakat dengan tema budidaya cacing Lumbricus bertujuan untuk: 1) Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam hal budidaya cacing Lumbricus 2) Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam hal manajemen usaha budidaya cacing Lumbricus 3) Membentuk kelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dengan budidaya cacing Lumbricus. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi 1) Tahapan sosialisasi dan koordinasi dengan khalayak sasaran 2) Tahapan pelaksanaan yang terdiri dari tahapan pelatihan budidaya cacing Lumbricus dan juga kunjungan studi banding ke praktisi unit usaha cacing Lumbricus di Kota Malang.3) Tahapan evaluasi dan monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa unit usaha cacing Lumbricus khalayak sasaran berjalan sesuai dengan prosedur. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah 1) Pendampingan budidaya cacing masih perlu diteruskan. 2) Anggota/kelompok budidaya cacing sudah mulai menikmati hasil panen.3) Perlu pembahasan lebih lanjut tentang jaringan keanggotaan kelompok budidaya cacing dan jaringan pemasaran selain ke Kota Malang.

Kata kunci: cacing; budidaya; petani**ABSTRACT**

The audience of this people empowerment program are farmers in Pudak sub-district, Ponorogo City. The aims of this program are 1) Improving people's skills in Lumbricus worm cultivation 2) Improving people's skills in management of Lumbricus worm farming business 3) Establishing people's economically independent with Lumbricus worm cultivation. Stages of people empowerment activities are including 1) Stages of socialization and coordination with audience 2) Stages of implementation consist of training stages of Lumbricus worm cultivation as well as visits to the practitioner Lumbricus worm business unit in Malang City 3) Evaluation and monitoring stages , for ensuring that the Lumbricus worm business unit the audience runs with the procedure. The conclusion of community service activity are 1) Assistance of worm cultivation needed to be continued 2) Members of groups of worm cultivation have started enjoying the harvest 3) Discussions are needed about network membership of worm farming group and marketing network other than to Malang City.

Keywords: worm; cultivation; farmer

PENDAHULUAN

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu komponen kegiatan yang bertujuan untuk mengaplikasikan produk iptek dan seni secara terencana oleh sivitas akademika. Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka turut membangun budaya masyarakat berketrampilan sains, teknologi, seni, berbasis kepakaran individu dan/atau kelompok serta menciptakan peluang terwujudnya transfer sains, teknologi dan seni. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga dan langsung kepada masyarakat untuk turut mensukseskan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila serta meningkatkan misi dan fungsi perguruan tinggi.

Jenis kegiatan pengabdian mencakup semua bidang iptek dan seni yang diampu oleh sivitas akademika UNIDA Gontor secara individu maupun secara unit kepakaran. Prioritas diutamakan bagi program yang dibutuhkan segera oleh kelompok masyarakat secara organisasi maupun badan usaha kecil menengah (UKM). Bentuk kegiatan mencakup pendampingan dan penerapan produk iptek dan karya seni khususnya budidaya cacing tanah *Lumbricus*. Petani desa Pudak Kecamatan Pudak memiliki permasalahan dalam hal ekonomi. Hal ini dikarenakan petani mengandalkan hasil panen sebagai satu-satunya pendapatan. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan memberikan ketrampilan pada petani, salah satunya adalah budidaya cacing *Lumbricus*. Cacing *Lumbricus Rubellus* merupakan salah satu jenis cacing yang dapat berpotensi untuk dikembangkan menjadi pakan ternak dan ikan yang murah. Menurut Palungkun (2008), Kandungan protein cacing tanah ini ternyata lebih tinggi dari sumber protein lainnya. Selain protein, kandungan gizi lainnya yang terdapat dalam tubuhcacing tanah antara lain lemak 7- 10%, kalsium 0,55%, fosfor 1% dan serat kasar 1,08%. Namun pengetahuan petani, tentang cara budidaya cacing tersebut masih sangat terbatas. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya transfer teknologi dari universitas kepada petani mengenai teknik budidaya cacing tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk: 1) Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam hal budidaya cacing *Lumbricus*; 2) Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam hal manajemen usaha budidaya cacing *Lumbricus*; 3) Membentuk kelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dengan budidaya cacing *Lumbricus*.

Adapun sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah 1) Terciptanya kawasan binaan di wilayah kecamatan Pudak khususnya, dan Kabupaten Ponorogo umumnya tentang budidaya cacing lumbricus; 2) Berkembangnya kemitraan dengan dunia usaha, institusi pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat umum; 3) Meningkatnya budaya peduli masyarakat berbasis entrepreneurship di kalangan sivitas akademika UNIDA Gontor.

METODE

Metode yang akan digunakan didalam kegiatan ini adalah penyuluhan tentang budidaya cacing *Lumbribus*. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengembangan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sasaran. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan mulai Bulan Agustus 2016 sampai Juni 2016 dengan masyarakat sasaran sebagai mitra adalah petani di desa

Pudak Kecamatan Pudak. Tahapan pengabdian masyarakat dibagi menjadi tahapan awal, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi.

Tahapan awal meliputi sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat dan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Adapun tahapan pelaksanaan meliputi penyuluhan dan pelatihan budidaya cacing. Materi pelatihan disampaikan dengan disertai peragaan serta diskusi dengan khalayak sasaran. Untuk lebih memudahkan pemahaman, khalayak sasaran melakukan praktik langsung dalaserta dilaksanakan *study banding* ke Malang untuk lebih memahami tentang budidaya cacing tanah. sedangkan tahapan terakhir pengabdian masyarakat ini adalah tahapan monitoring yang dilaksanakan dengan pendampingan dan kunjungan ke lokasi usaha mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan petani saat ini adalah seringkali selama menunggu musim panen, petani tidak ada usaha sampingan untuk mendapatkan pendapatan sehingga kondisi perekonomian petani seringkali berada di bawah garis kesejahteraan, termasuk petani di desa Pudak Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, dapat dilakukan dengan cara memberikan ketampilan tambahan untuk para petani sehingga bisa mendapatkan peluang usaha diluar profesi sebagai petani. Salah satu peluang usaha tersebut adalah budidaya cacing *Lumbricus*. Peluang usaha yang berhubungan dengan budidaya cacing *Lumbricus* dapat berupa produksi kacng yang dijual sebagai pupuk tanaman, pembibitan cacing dan biomassa cacing untuk pemenuhan kebutuhan bahan pakan ternak, dan juga untuk bahan baku obat-obatan dan kosmetik. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sumber protein hewani dapat diperoleh dari tepung cacing tanah. Akhir-akhir ini cacing *Lumbricus* ini mulai dibutuhkan dan dikembangkan oleh masyarakat (Mubarok, 2003).

Tahapan pertama pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah tahapan sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat kepada khalayak sasaran. Kegiatan sosialisasi merupakan tahapan yang sangat penting agar khalayak sasaran lebih memahami rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat dan berpartisipasi secara aktif hadir dalam pada setiap tahapan kegiatannya.



Gambar 1. Sosialisasi pengabdian masyarakat pada khalayak sasaran



Gambar 2. Pembentukan pengurus kelompok budidaya cacing di wilayah kecamatan Pudak

Tahapan pengabdian masyarakat berikutnya adalah tahapan pelaksanaan, yaitu tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan meliputi tahapan pelatihan budidaya cacing *Lumbricus*. Tahapan pelatihan dilakukan di Balai Desa Desa Pudak Kulon dengan metode *Forum Group Discussion (FGD)*, dimana materi disampaikan secara ceramah kemudian dilakukan diskusi. Diskusi dilaksanakan untuk memberikan kesempatan pada peserta pelatihan yang belum memahami materi agar bisa mengajukan pertanyaan.



Gambar 3. Pelatihan budidaya cacing dengan narasumber A.A. Adam Maulida dari Kota Malang



Gambar 4. Suasana Pelatihan di Balai desa Pudak Kulon

Gambar 5. Foto bersama setelah pelatihan

Salah satu materi yang ditekankan pada materi budidaya cacing *Lumbricus* adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang optimal. Kegiatan yang terpenting dalam budidaya cacing *Lumbricus* adalah untuk menciptakan suasana atau kondisi lingkungan yang sesuai dengan habitatnya di alam. Hal ini dimaksudkan agar cacing *Lumbricus* dapat beradaptasi dan berkembang dengan baik. Cacing *Lumbricus* menghendaki suasana lingkungan yang teduh, lembab, dan terhindar dari sinar matahari langsung sehingga diperlukan bangunan pelindung, wadah pemeliharaan serta sarang atau media (Rukmana, 1999).

Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat berikutnya adalah kunjungan lapang atau studi banding ke Kota Malang untuk belajar pada praktisi yang bergerak dibidang budidaya cacing tanah. Tujuan dari studi lapang adalah untuk memberikan pandangan dan motivasi pada khalayak sasaran tentang potensi budidaya cacing *Lumbricus*. Diharapkan setelah mengetahui kesuksesan praktisi yang bergerak dibidang budidaya cacing tanah, khalayak sasaran akan lebih semangat dalam mengerjakan usaha budidaya cacing *Lumbricus*.



Gambar 5. Kegiatan studi banding budidaya cacing *Lumbricus* di Sukun Malang



Gambar 6. Kegiatan studi banding budidaya cacing di Sukun Malang

Setelah unit usaha budidaya cacing tanah berjalan, tahapan terpenting berikutnya adalah tahapan monitoring dan evaluasi. Tahapan monitoring dan evaluasi ini dilakukan dengan mengunjungi lokasi usaha khalayak sasaran untuk memastikan bahwa unit usaha budidaya cacing masih berjalan sesuai dengan prosedur yang baik dan benar.



Gambar 7. Monitoring kekelompok budidaya cacing *Lumbricus*



Gambar 8. Monitoring lokasi unit usaha cacing lumbricus *Lumbricus*



Gambar 9. Pendampingan dan kunjungan kekelompok budiday cacing *Lumbricus*

SIMPULAN

1. Pendampingan budidaya cacing masih perlu diteruskan.
2. Anggota/kelompok budidaya cacing sudah mulai menikmati hasil panen.
3. Perlu pembahasan lebih lanjut tentang jaringan keanggotaan kelompok budidaya cacing dan jaringan pemasaran selain ke Kota Malang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis ucapkan pada aparatur pemerintah Kecamatan Pudak atas kerjasamanya demi kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat

REFERENSI

- Mubarok dan Lili Zalizar. 2003. Budidaya Cacing Tanah Sebagai Usaha Alternatif di Masa Krisis Ekonomi. Dedikasi. 1 (1) 129-135
- Palungkun, R. 2008. Sukses Beternak Cacing Tanah *Lumbricus rubellus*. Jakarta: Penebar Swadaya. PP: 5-15
- Rukmana, 1999. *Rukmana*, H.R. 1999, Budi Daya Cacing Tanah, Penerbit Kanisius (Anggota. IKA-PI), Yogyakarta.